

**DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH DAN KETIMPANGAN WILAYAH
(STUDI KASUS PROPINSI JAWA BARAT)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ALTITO R. SIAGIAN
NIM. C2B006010

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Altito R. Siagian
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006010
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH DAN
KETIMPANGAN WILAYAH (STUDI
KASUS PROPINSI JAWA BARAT)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Miyasto, SU.

Semarang, 5 September 2010
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Miyasto, SU.
NIP. 19501225 197501 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Altito R. Siagian
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006010
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH DAN
KETIMPANGAN WILAYAH (STUDI
KASUS PROPINSI JAWA BARAT)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 1 Oktober 2010

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Miyasto, SU. (.....)

2. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS. (.....)

3. Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Altito R. Siagian, menyatakan bahwa skripsi dengan judul Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 5 September 2010
Yang membuat pernyataan

Altito R. Siagian
NIM : C2B006010

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of the implementation of fiscal decentralization on regional economic growth and regional disparities in 25 regencies/cities in West Java Province for a five-year implementation period, since 2004-2008. Variables studied its influence on regional economic growth is the degree of fiscal decentralization, tax ratio district, the total work force, and agglomeration level of 25 regencies/cities in West Java Province. While for regions disparity the variables are examined degree of fiscal decentralization, tax ratio district, the total work force, and agglomeration level and economic growth rate of 25 regencies/cities in West Java Province, using the simultaneous recursive model.

The analysis concluded that fiscal decentralization is positive effect and statistically significant amount of 211.3880 to regional economic growth in 25 regencies/cities in West Java Province. Meanwhile for regions disparity, fiscal decentralization is negative effect and statistically significant amount of 287.8996 to disparities between regency/cities in West Java Province. During five years of implementation of the fiscal decentralization in West Java Province could be proved that the empirical, fiscal decentralization make the economic growth of 25 regencies/cities in West Java Province, increased every year, but the graphics improved of economic growth every year thus increasing regional disparities occur between regencies/cities in West Java Province.

Keywords : Fiscal decentralization, Regional Economic Growth, Regional Disparities

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama lima tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2004-2008. Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah derajat desentralisasi fiskal, rasio pajak daerah, jumlah tenaga kerja, dan tingkat aglomerasi dari 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Sementara untuk ketimpangan wilayah variabel yang diteliti adalah derajat desentralisasi fiskal, rasio pajak daerah, jumlah tenaga kerja, dan tingkat aglomerasi, serta tingkat pertumbuhan ekonomi dari 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, dengan menggunakan persamaan model simultan berulang (*recursive model*).

Hasil analisis menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik sebesar 211.3880 terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Sementara itu untuk ketimpangan wilayah, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik sebesar 287.8996 ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Selama 5 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Propinsi Jawa Barat secara empirik dapat dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat meningkat tiap tahunnya, tetapi grafik pertumbuhan ekonomi meningkat tiap tahunnya justru meningkatkan ketimpangan wilayah yang terjadi antar kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Ketimpangan Wilayah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap akau” (Mazmur 56 : 12)

*“Orang-orang yang menabur dengan mengucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-soarai, Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-soarai sambil membawa berkas-berkasnya”
(Mazmur 126 : 5-6)*

“Hadapi lah masalah dengan senyuman, sebab senyuman adalah obat bagi dahaga kebahagiaan”

Kupersembahkan karya ini untuk:

❖ Tuhan Yesus Sang Pencipta dan Juru Selamat ku

❖ Bapa dan Mama serta Abang dan Adik ku

❖ Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

❖ Negara Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan kemuliaan yang agung penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih, anugerah dan perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN KETIPANGAN WILAYAH (STUDI KASUS PROPINSI JAWA BARAT)”** ini sesuai pada waktunya. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H.M Chabacib, Msi, Akt, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Miyasto, SU, Selaku Dosen Pembimbing yang telah mengajarkan penulis dengan sangat sabar dan telaten, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, M.SP, Selaku Dosen Wali, yang telah mengarahkan penulis selama masa menempuh studi di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.

4. Para dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
5. Bapa dan Mama, yang selalu ada buat saya. Saya bangga menjadi anak Bapa dan Mama. Bapa dan Mama yang selalu sayang dan selalu berjuang hanya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik buat saya. Bapa dan Mama yang selalu memanjatkan doa untuk kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan keberhasilan saya selama menjalani studi saya. Tak banyak yang dapat saya lakukan untuk dapat membalas segala pengorbanan dan kasih sayang dari Bapa dan Mama. Hanya doa yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat saya panjatkan agar Bapa dan Mama sehat selalu dan beserta dalam lindungan-Nya selalu. Sai gok ma pasu-pasu di Bapa dohot Mama asa lam ganjang umur ni Bapa dohot Mama, jala sai saur matua ma Bapak dohot Mama.
6. Abang, kaka, dan adik saya yang selalu turut dalam memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus untuk abang saya Leo dan adik ku Gunawan yang telah menjadi abang dan adik yang baik serta menunjukkan rasa persaudaran yang berarti buat saya. tak ada yang lebih berarti yang saya rasakan selain rasa bangga menjadi saudara kalian, Buat Bang Rittar, Bang David, Ronald, Kak Donna, Kak Lina, Kak Isa, Kak Yanti, Kak Risma (Punguan Pahompu ni Op. Ganda Pardosi), Terima Kasih Abang dan Kaka ku

7. Buat abang, kaka, teman-teman, dan adik-adik saya di NHHBP Kertanegara Selatan, yang selalu menjadi saudara seiman saya, terima kasih atas semuapersahabatan, persaudaraan, pengalaman, nasehat, saran dan kritik, serta suka dan duka yang pernah saya rasakan selama menjadi keluarga besar NHHBP Kertanegara Selatan Semarang. *I Proud To Be A Part Of You.*
8. Buat Kak Yanti Siagian, terima kasih Kaka ku buat semua nasehat, perhatian dan keperdulian yang kaka berikana buat aku, buat Bang Taro Sianipar terima kasih bang udah mau jadi teman curhat ku, Bang Moncen Sianturi, abang seperguruan ku terima kasih bang udah jadi abang buat ku, dan tetap semangat bang pasti bias, Bang Lamhot “Pace” Hutabarat, terimakasih bang pace buat buku-buku yang udah dipinjamin ke aku dan semua bantuannya selama aku negrjain skripsi, Bang Biko, Thanks bang udah dibantuin bikini format skripsi yang benar, Rodo Togatorop, terimakasih buat segala bantuannya yah ces.
9. Buat anggi-anggi Balige awak, Martha “Centil” Siahaan, Bertha “Bino” Siahaan, Hakenia “Nikong” Lubis, Fransiska “Chika Silaban, terima kasih buat dukungan kalian semua selama proses pengerjaan skripsi ini, dan terimakasih juga buat persahabatan selamamasa-masa kuliah di Semarang, *I Love You Full Sista.*
10. Buat teman-teman saya seperjuangan saya yang menjadi teman saya dalam berjuang menempuh studi dan pengalaman selama saya menempuh pendidikan di semarang, Andy “Tuken” Purba, Del Akino “Bagor”

Tarigan, Christian “Otong” Situmorang, Appara Fendro “Kuning” Siagian, Jery “Wiewie” Tambunan, Tulus “Bibir” Silalahi, Sopar “Bangke” Sirait, Joel “Singer” Lumbangaol, Alex “Sok Cool” Tambunan, Agripa “Ra Jelas” Fernando Tarigan, Andi “Lumpur” Sijabat, Daniel Joshua “Amer” Bakkara, Daniel “Jablay” Sinaga, Mitchel “OT” Sihombing, Marco “Eva” Rajagukguk, Uje “Tina” Butar-butur, Berton “Maya” Hutagaol, Suryanto “Shifu” Sipahutar, dan semua teman-teman yang mungkin belum disebutkan. Saya sangat bangga berbagi pengalaman dengan kalian semua.

11. Buat sahabat-sahabat masa remaja ku Repal Sianipar, Leo Simanjuntak, Lewi Pardede, Wiltar Simanjuntak, Choky Hutajulu. Terima kasih sahabat-sahabat ku karena kalian masih memberi semangat pada ku walaupun kita saling berjauhan.
12. Buat Idola Wahyuni Srikandi Tambunan, terima kasih buat Support yang kamu berikan dan telah menjadi teman curhat ku.
13. Buat Frida Yanti Putri Nababan, terima kasih buat semangat yang selalu kamu berikan buat aku.
14. Teman-teman PMK, terima kasih teman-teman karena udah jadi teman dalam pelayanan dan pengalaman yang menumbuhkan iman.
15. Teman-teman IESP 2006, terimakasih atas kerjasama dan pengalaman-pengalaman selama di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

16. Dan buat pihak-pihak lain yang mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dalam skripsi ini, terima kasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Pengesahan Kelulusan Ujian.....	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
<i>Abstract</i>	v
Abstraksi	vi
Motto dan Persembahan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xix
Daftar Gambar.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Fenomena Desentralisasi Fiskal.....	1
1.1.2 <i>Research Gap</i>	5
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17

2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Desentralisasi Fikal	17
2.1.1.1 Defenisi Desentralisasi Fikal.....	17
2.1.1.2 Indikator Desentralisasi Fikal.....	20
2.1.1.2.1 Penerimaan Daerah.....	21
2.1.1.2.2 Pengeluaran Pemerintah	25
2.1.1.2.3 Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah ...	27
2.1.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah	28
2.1.1.3.1 Teori Musgrave dan Rostow.....	28
2.1.1.3.2 Hukum Wanger.....	29
2.1.1.3.3 Teori Peacock dan Wiseman	31
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	34
2.1.2.1 Defenisi Pertumbuhan Ekonomi	34
2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	35
2.1.2.2.1 Teori Tahapan Linear	37
2.1.2.2.1.1 Teori Pertumbuhan Rostow	37
2.1.2.2.1.2 Teorri Pertumbuhan Harrod Domar	38
2.1.2.2.2 Model Perubahan Struktural.....	39
2.1.2.2.3 Revolusi Ketergantungan Internasional.....	40
2.1.3 Ketimpangan Wilayah.....	40
2.1.3.1 Defenisi Ketimpangan Wilayah	40
2.1.3.2 Teori Ketimpangan Wilayah.....	42
2.1.3.2.1 Teori Hirschman	42

2.1.3.2.2 Teori Myrdal.....	43
2.1.3.3 Kebijakan Otonomi Daerah	44
2.1.3.4 Pengukuran Ketimpangan Wilayah	44
2.1.3.4.1 Indeks Williamson.....	44
2.1.3.4.2 Indeks Entropi Theil	45
2.1.3.4.3 Indeks Jamie Bonet.....	46
2.1.4 Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi.....	46
2.1.5 Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Wilayah.....	50
2.1.6 Ketimpangan <i>versus</i> Pertumbuhan Ekonomi	50
2.1.6.1 Studi Data Silang Tempat	51
2.1.6.2 Studi Data Runtun Waktu	52
2.2 Penelitian terdahulu.....	53
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	57
2.4 Hipotesis.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	61
3.1.1 Variabel Penelitian.....	61
3.1.2 Defenisi Operasional.....	61
3.2 Jenis dan Sumber Data	64
3.3 Metode Pengumpulan Data	65
3.4 Metode Analisis	65
3.4.1 <i>Simultaneous Equation Regression Model</i>	66
3.4.1.1 Model Berulang (<i>Recursive Model</i>).....	67

3.4.2	Estimasi Model Regresi	69
3.4.3	Pengujian Asumsi Klasik	71
3.4.3.1	Uji Multikolinearitas	72
3.4.3.2	Uji Autokorelasi.....	73
3.4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	73
3.4.3.4	Uji Normalitas.....	75
3.4.4	Pengujian Statistik Analisis Regresi	75
3.4.4.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	76
3.4.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji-f)	77
3.4.4.3	Uji Signifikansi Individual (Uji-t).....	77
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	79
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	79
4.1.1	Propinsi Jawa Barat.....	79
4.1.2	Kondisi Makro Ekonomi 25 Kab/kota Jawa Barat	79
4.1.3	Desentralisasi Fiskal 25 Kab/kota Jawa Barat	81
4.1.4	Pajak Daerah 25 Kab/kota Jawa Barat	83
4.1.5	Tenaga Kerja 25 Kab/kota Jawa Barat.....	85
4.1.6	Aglomerasi 25 Kab/kota Jawa Barat.....	87
4.1.7	Ketimpangan Wilayah 25 Kab/kota Jawa Barat	89
4.2	Analisis Data	91
4.2.1	Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan	92
4.2.1.1	Pengujian Kelayakan Analisis Regresi	92
4.2.1.1.1	Uji Normalitas Data.....	92

4.2.1.1.2 Uji Multikolinearitas.....	93
4.2.1.1.3 Uji Autokorelasi	94
4.2.1.1.4 Uji Heteroskedastisitas	95
4.2.1.2 Hasil Analisis Regresi.....	97
4.2.1.2.1 Estimasi Model Regresi.....	97
4.2.1.2.2 Koefisien Detrerminasi (R^2)	98
4.2.1.2.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji-f).....	98
4.2.1.2.4 Uji Signifikansi Individual (Uji-t)	99
4.2.1.3 Interpretasi Hasil	100
4.2.2 Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan.....	107
4.2.2.1 Pengujian Kelayakan Analisis Regresi	108
4.2.2.1.1 Uji Normalitas Data.....	108
4.2.2.1.2 Uji Multikolinearitas.....	108
4.2.2.1.3 Uji Autokorelasi	109
4.2.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas	111
4.2.2.2 Hasil Analisis Regresi.....	112
4.2.2.2.1 Estimasi Model Regresi.....	112
4.2.2.2.2 Koefisien Detrerminasi (R^2)	113
4.2.2.2.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji-f).....	114
4.2.2.2.4 Uji Signifikansi Individual (Uji-t)	115
4.2.2.3 Interpretasi Hasil	115
BAB V PENUTUP.....	123
5.1 Kesimpulan	123

5.2 Saran	125
Daftar Pustaka.....	126
Daftar Lampiran.....	129

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB ADHK 2000 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008	7
Tabel 1.2 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008	9
Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008.....	80
Tabel 4.2 Derajat Desentralisasi Fiskal 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008.....	82
Tabel 4.3 Rasio Pajak Daerah 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008	84
Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Kerja 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008	86
Tabel 4.5 Tingkat Aglomerasi 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008	88
Tabel 4.6 Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008.....	90
Tabel 4.7 Estimasi Model <i>Panel Least Square (Cross-Section Weights and White Cross-Section)</i>	91
Tabel 4.8 Hasil Uji Jarque-Bera (J-B test) Persamaan PE	92
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Parsial Persamaan PE.....	93

Tabel 4.10 Hasil Uji Durbin-Watson (D-W test) Persamaan PE	94
Tabel 4.11 Hasil Uji Park Persamaan PE	96
Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi Simultan (f-test, dengan $\alpha = 0,05$) Persamaan PE	99
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikansi Simultan (f-test, dengan Prob = 0,000) Persamaan PE.....	99
Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikansi Individual (t-test) Persamaan PE.....	100
Tabel 4.15 Hasil Uji Jarque-Bera (J-B test) Persamaan KW	108
Tabel 4.16 Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Parsial Persamaan KW	109
Tabel 4.17 Hasil Uji Durbin-Watson (D-W test) Persamaan KW	110
Tabel 4.18 Hasil Uji Park Persamaan KW	111
Tabel 4.19 Hasil Uji Signifikansi Simultan (f-test, dengan $\alpha = 0,05$) Persamaan KW.....	114
Tabel 4.20 Hasil Uji Signifikansi Simultan (f-test, Prob = 0,000) Persamaan KW.....	114
Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikansi Individual (t-test) Persamaan KW.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Wanger	30
Gambar 2.2	Teori Pengeluaran Pemerintah Peacock dan Wiseman	32
Gambar 2.3	Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.1.1 Fenomena Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah konsep baru di Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah. Namun pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut memunculkan fenomena dimana terjadi banyak kasus dalam penerapannya, yaitu pencapaian dari kedua tujuan itu tidak bisa selalu berjalan beriringan. Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ternyata tidak dapat dilakukan di semua wilayah. Kebijakan ini memunculkan kesiapan yang berbeda dari setiap daerah. Sebagian besar daerah di berbagai wilayah di Indonesia ternyata tidak siap untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, walaupun ada beberapa daerah yang berhasil dalam pencapaian tujuan dari desentralisasi fiskal tersebut.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Namun dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997).

Desentralisasi merupakan suatu tuntutan reformasi yaitu adanya keadilan dalam bidang politik dan ekonomi bagi masyarakat daerah. Keadilan yang masih di rasa kurang ini dianggap sebagai penyebab munculnya ras atidak puas terhadap pemerintah oleh masyarakat daerah. Allen dalam Mudarajad Kuncoro (2004) menyatakan bahwa, sejarah perekonomian telah mencatat desentralisasi telah muncul sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan pusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan penuh dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Semenjak pemerintahan orde baru berakhir, maka isu dan tuntutan tentang perimbangan wewenang pemerintah pusat dan daerah sangat deras mengalir, dan akhirnya UU No. 5 Tahun 1974 dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Semenjak dilaksanakannya undang-undang ini banyak perubahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU No. 22 Tahun 1999 juga memberikan perubahan pada hubungan pemerintah pusat dan daerah, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari bentuk sentralistis menjadi desentralistis, dalam arti adanya pengalihan sebagian besar wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun wewenang yang tetap menjadi otoritas pemerintah pusat adalah di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, serta agama.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU No. 22 / 1999. Praktek desentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU No. 25/ 1999 yang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “*Money Follows Functions*”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi kedua undang-undang tersebut menjadi UU No. 32 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 22 tahun 1999) tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 (sebagai revisi UU No. 25 tahun 1999) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Permasalahan yang muncul dalam penerapan kedua UU tersebut antara lain (RPJMN 2004-2009): 1) Belum jelasnya pembagian kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah; 2) Berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 3) Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah; 4) Belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien; 5) Masih terbatas dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah; 6) masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah; 7) pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.

Titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II (Dati II), dengan tiga dasar pertimbangan, yaitu: Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis minim; dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif; dan yang terakhir adalah karena Dati II adalah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang mengetahui kebutuhan dan potensi rakyatnya.

Berdasarkan pasal 5 UU No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan keuangan Pusat-Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya PAD dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai dana non PKPD, karena berasal dari pengelolaan fiskal daerah. Khusus pinjaman daerah pemerintah pusat masih khawatir dengan kondisi utang negara, sehingga belum mengizinkan penerbitan utang daerah.

1.1.2 *Research Gap*

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006) yang menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional di Kolombia, memiliki kesimpulan yang selaras dengan penelitian yang dilakukan Garry M. Woller dan Kerk Phillips (1998). Penelitian Bonet (2006) menemukan bukti yang kuat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal meningkat di tiap daerah, namun disparitas pendapatan antar wilayah juga akan meningkat selama periode yang dianalisis tersebut. Hal itu menurut Bonet (2006) disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain alokasi sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yang cenderung lebih besar terhadap pengeluaran rutin (upah atau gaji) dibanding terhadap investasi untuk infrastruktur atau permodalan di daerah. Faktor berikutnya adalah kurangnya kapasitas kelembagaan (institusi) pada pemerintah daerah, tidak adanya insentif yang cukup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan kurangnya redistribusi transfer nasional (pusat).

Demikian pula dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, yang merupakan salah satu negara sedang berkembang, khususnya Propinsi Jawa Barat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih selama sembilan tahun, yaitu mulai tahun 2001 sampai dengan 2010 masih mengalami kasus klasik yaitu, walaupun pelaksanaan desentralisasi fiskal signifikan menumbuhkan ekonomi regional tiap kabupaten/kota, namun di sisi lain ketimpangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Garry M. Woller dan Kerk Phillips (1998) yang menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang dengan sampel 23 negara sedang berkembang (NSB) di dunia, membuktikan bahwa faktor yang mempengaruhi kebijakan desentralisasi fiskal dalam memacu pertumbuhan ekonomi adalah besarnya struktur fiskal suatu negara. Melalui penelitian ini juga dibuktikan, penerapan desentralisasi fiskal memiliki hubungan timbal balik yang lemah antara tingkat penerimaan daerah (*level of revenue decentralisation*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi (*economic growth rates*).

Penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006), dengan meneliti kasus yang terjadi di Kolombia, semakin memperkuat kesimpulan dari penelitian Garry M. Woller dan Kerk Phillips (1998), bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara-negara sedang berkembang memiliki masalah. Penelitian Bonet (2006) bahkan memperkuat kesimpulan tersebut dengan menemukan masalah ketimpangan antar wilayah akibat pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara sedang berkembang (studi kasus: Kolombia). Di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan dan ketimpangan wilayah merupakan kasus yang sering terjadi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di berbagai propinsi.

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten/Kota Pada
Propinsi Jawa Barat (2004-2008)
(miliar Rp)

N0	Kabupaten/Kota (Regency/City)	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Kab. Bogor	23671	25056	26546	28151	29721	26629.00
2	Kab. Sukabumi	6828	7126	7405	7715	8015	7417.80
3	Kab. Cianjur	6570	6821	7048	7343	7640	7084.40
4	Kab. Bandung	21575	22723	17640	18648	19674	20052.00
5	Kab. Garut	8418	8768	9129	9563	10011	9177.80
6	Kab. Tasikmalaya	4178	4337	4511	4707	4896	4525.80
7	Kab. Ciamis	5632	5890	6116	6422	6739	6159.80
8	Kab. Kuningan	3073	3198	3330	3470	3619	3338.00
9	Kab Cirebon	6038	6344	6670	7027	7372	6690.20
10	Kab. Majalengka	3387	3538	3686	3866	4042	3703.80
11	Kab. Sumedang	4311	4506	4694	4912	5137	4712.00
12	Kab. Indramayu	13369	12323	12621	12956	13234	12900.60
13	Kab. Subang	5634	6026	6174	6473	6780	6217.40
14	Kab. Purwakarta	5547	5742	5964	6197	6506	5991.20
15	Kab. Karawang	13424	14480	15568	16525	17553	15510.00
16	Kab. Bekasi	38977	41319	43793	46481	49302	43974.40
17	Kota Bogor	3361	3567	3782	4013	4253	3795.20
18	Kota Sukabumi	1341	1421	1509	1607	1705	1516.60
19	Kota Bandung	19875	21371	23043	24942	26979	23242.00
20	Kota Cirebon	4690	4920	5192	5513	5824	5227.80
21	Kota Bekasi	11113	11740	12453	13255	14042	12520.60
22	Kota Depok	4441	4750	5066	5418	5771	5089.20
23	Kota Cimahi	4898	5122	5396	5639	5908	5392.60
24	Kota Tasikmalaya	2833	2947	3098	3283	3470	3126.20
25	Kota Banjar	562	588	616	646	677	617.80
Standar Deviasi (SD)		6348.41	6665.40	6733.60	7169.75	7617.71	-

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
 Jawa Barat dalam Angka 2008

Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari 25 kabupaten (Kabupaten Bandung Barat tidak dihitung, karena baru dimekarkan pada tahun 2007) yang memiliki PDRB yang bervariasi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, hal ini dapat dilihat dari standar deviasi tiap tahun yang bergerak naik dari angka 6348.41 pada tahun 2004 sampai dengan 7617.17 pada tahun 2008, maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi meningkat pada masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di 25 kabupaen/kota yang ada di Propinsi jawa barat cukup bervariasi yaitu antara Rp 617,80 miliar sampai dengan Rp 43.974 miliar. PDRB kabupaten/kota tertinggi di Propinsi Jawa Barat dimiliki oleh Kota Bekasi dengan rata-rata PDRB sebesar RP 43.974 miliar, di ikuti oleh Kabupaten Bogor dengan rata-rata PDRB sebesar Rp 26.629 miliar, serta Kota Bandung dengan rata-rata Rp 23.242 miliar. Sedangkan rata-rata PDRB kabupaten/kota terendah dimiliki oleh Kota Banjar dengan PDRB sebesar Rp 617,80 miliar.

Faktor-faktor yang menyebabkan bervariasinya Pendapatan Regional Bruto Daerah di masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat juga cukup bervariasi, antara lain pengembangan sektoral yang berbeda antar daerah, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah, sumber-sumber penerimaan yang berbeda antar daerah, dan lain sebagainya. Adapun Kota Banjar memiliki rata-rata PDRB yang sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, karena Kota Banjar merupakan daerah yang baru dimekarkan pada tahun 2004, sehingga masih dalam proses pembangunan dan memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil.

Tabel 1.2
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi
Jawa Barat (2004-2008)

No	Kabupaten/Kota	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	Rata-rata
1	Kab. Bogor	5,58	5,85	5,95	6,05	5,58	5,80
2	Kab. Sukabumi	3,96	4,35	3,92	4,19	3,89	4,06
3	Kab. Cianjur	3,97	3,82	3,34	4,18	4,04	3,87
4	Kab. Bandung	5,61	5,55	5,85	5,92	5,30	5,65
5	Kab. Garut	4,01	4,16	4,11	4,76	4,69	4,35
6	Kab. Tasikmalaya	3,52	3,83	4,01	4,33	4,02	3,94
7	Kab. Ciamis	4,36	4,58	3,84	5,01	4,94	4,55
8	Kab. Kuningan	4,04	4,08	4,12	4,22	4,29	4,15
9	Kab Cirebon	4,67	5,06	5,14	5,35	4,91	5,03
10	Kab. Majalengka	4,08	4,46	4,18	4,87	4,57	4,43
11	Kab. Sumedang	4,31	4,52	4,17	4,64	4,58	4,44
12	Kab. Indramayu	4,65	-7,82	2,42	2,65	2,14	0,81
13	Kab. Subang	7,17	6,97	2,45	4,85	4,74	5,24
14	Kab. Purwakarta	3,72	3,51	3,87	3,90	4,99	4,00
15	Kab. Karawang	10,78	7,87	7,52	6,15	6,22	5,55
16	Kab. Bekasi	6,11	6,01	5,99	6,14	6,07	6,06
17	Kota Bogor	6,10	6,12	6,03	6,09	5,98	6,06
18	Kota Sukabumi	5,77	5,95	6,23	6,51	6,11	6,11
19	Kota Bandung	7,49	7,53	7,83	8,24	8,17	7,85
20	Kota Cirebon	4,66	4,89	5,54	6,17	5,64	5,38
21	Kota Bekasi	5,38	5,65	6,07	6,44	5,94	5,90
22	Kota Depok	6,50	6,96	6,65	6,95	6,51	6,71
23	Kota Cimahi	4,34	4,56	4,82	5,03	4,77	4,70
24	Kota Tasikmalaya	4,99	4,02	5,11	5,98	5,70	5,16
25	Kota Banjar	0,00	4,63	4,71	4,93	4,82	3,82
Standar Deviasi (SD)		1.07	1.46	1.16	0.95	0.85	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah)

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di semua kabupaten/kota Propinsi Jawa Barat memberi efek peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang signifikan, yaitu dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota antara 0,81 persen sampai dengan 7,85 persen, tetapi laju pertumbuhan ekonomi daerah ini mengalami fluktuasi tiap tahunnya, yaitu dapat dilihat dari standar deviasi yang meningkat pada tahun 2003-2004 s/d 2004-2005 yaitu pada angka 1,07 – 1,46, tetapi menurun pada tahun 2004-2005 s/d 2007-2008 pada angka 1,46 – 0,085. Pertumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan oleh laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki laju PDRB terbesar adalah Kota Bandung yaitu sebesar 7,85 persen, dan yang terendah adalah Kabupaten Indramayu yaitu sebesar 0,81 persen. Tetapi ada fenomena lain yang terjadi tentang pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, meskipun Kabupaten Indramayu memiliki laju pertumbuhan yang kecil, Kabupaten Karawang yang rata-rata pertumbuhan ekonominya adalah 5,55 persen terus mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercermi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil-nya yang terus menurun tiap tahunnya.

Desentralisasi fiskal yang diterapkan tidak serta merta menjadikan seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan laju pertumbuhan PDRB secara bersamaan. Berdasarkan tabel PDRB atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2004-2008, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun hanya sebagian

wilayah saja yang mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam atau *factor endowments*, letak geografis dan kebijakan pemerintah daerah. Kondisi *endowments factor* setiap daerah yang bervariasi berdampak terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan wilayah. Terjadinya migrasi tenaga kerja dan pergerakan modal ke arah *core*, serta tidak berjalannya mekanisme *trickle down effect* akan berdampak meningkatkan ketimpangan antar daerah (Hirschman, 1970)

Penelitian yang dilakukan Garry M. Woller dan Kerk Phillips (1998) mengambil Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRBC) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006) tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan antar wilayah di Negara Kolombia mengambil variabel derajat desentralisasi fiskal yang merupakan rasio perbandingan dari penerimaan asli daerah terhadap total penerimaan daerah masing-masing daerah untuk menguji seberapa besar peranan penerimaan daerah untuk mempengaruhi ketimpangan antar wilayah pada daerah-daerah tersebut.

Dalam penelitian Irina Jing Jin dan Heng-fu Zou (2000) tentang pengaruh alokasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah di Cina, mengambil pajak daerah, pertumbuhan tenaga kerja, dan keterbukaan ekonomi (aglomerasi) sebagai indikator yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pada suatu wilayah.

Penelitian yang dilakukan Irina Slinko (2002), melihat indikator-indikator desentralisasi fiskal yang dibentuk menjadi variabel penelitian diambil dari penerimaan-penerimaan daerah dan pengeluaran pemerintah.

Dengan tingkat perbedaan yang demikian, dikhawatirkan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang semula ditujukan untuk memajukan dan mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah, justru akan terjadi sebaliknya yaitu akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pertumbuhan antar daerah. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat bervariasi antar daerah setekah pelaksanaan desentralisasi fiskal, disinyalir terjadi peningkatan ketimpangan antar kabupaten/kota pada propinsi Jawa Barat. Tetapi tidak dapat disangkal juga bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di berbagai kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat. oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul tentang **“Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Propinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan suatu produk kebijakan pemerintah, sebagai bentuk pengalihan otoritas pengelolaan sektor fiskal daerah, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang dimilikinya serta memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan daerahnya. Untuk memenuhi kebutuhan daerahnya pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dengan keadaan di atas, maka dapat dirumuskan masalah utama yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah. Melalui sumber-sumber penerimaan daerah ini seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Barat. Terkait hal ini maka muncul pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan adalah “apakah dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah (kabupaten/kota) di Propinsi Jawa Barat pada periode Tahun 2004-2008?”
2. Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Propinsi Jawa Barat, muncul fenomena dimana pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat yang selalu meningkat setiap tahunnya setelah pelaksanaan desentralisasi

fiskal tersebut, namun di sisi lain terjadi ketimpangan pendapatan regional antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Oleh karena itu pertanyaan penelitian yang muncul adalah “apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah-daerah (kabupaten/kota) Propinsi Jawa Barat secara signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah dan apa penyebab ketimpangan wilayah di Propinsi Jawa Barat pada periode Tahun 2004-2008?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat
2. Menganalisis tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, selama pelaksanaan desentralisasi fiskal

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis adalah sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah Propinsi Jawa Barat, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, serta pemerataan ketimpangan antar wilayah.
2. Kegunaan ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan teori-teori aplikasi ekonomi publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dan struktur penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua akan diuraikan landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga dijelaskan definisi operasional yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel-variabel dalam penelitian. Metode analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat diuraikan tentang deskripsi objek. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan

diinterpretasikan. Setelah data dianalisis, dalam pembahasan dijelaskan implikasi dari hasil analisis data dan intepretasi yang dibuat dalam penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab lima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Dan saran sebagai masukan pada penelitian mendatang. Saran-saran yang diajukan untuk perbaikan pelaksanaan (praktek di lapangan) dan perbaikan penelitian berikutnya berdasarkan penerapan teori yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam menganalisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Regional (studi kasus kabupaten/kota propinsi Jawa Barat), penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah teori tentang desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan, desentralisasi fiskal dan ketimpangan, dan pertumbuhan *versus* ketidakmerataan. Teori-teori ini yang akan dijadikan peneliti sebagai dasar pemikiran dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian.

Selain itu, agar secara empiris dapat dihubungkan dengan hasil-hasil penelitian sejenis atau yang memiliki topik yang hampir sama, maka dilengkapi juga dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut sekaligus menjadi acuan dan komparasi dalam penelitian ini.

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

2.1.1.1 Defenisi Desentralisasi Fiskal

Penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001. Dalam perjalanannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi undang-undang tersebut menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun

2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberlakukan pada bulan desember 2004 (RPJMN 2004-2009)

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Ebel dan Yilmaz (2002) ada tiga bentuk/variasi desentralisasi, dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah, yaitu:

1. *Decontretation*

Merupakan pelimpahan kewewenangan dari agen-agen pemerintah pusat yang ada di ibukota negara, pada agen-agen di daerah.

2. *Delegation*

Merupakan penunjukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tanggung jawab pada pemerintah pusat

3. *Devolution*

Merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, dimana daerah juga diberi kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Mengingat prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari

desentralisasi yang ketiga (*devolution*). Lebih lanjut Slinko (2002) menyatakan bahwa:

Under the concept of “fiscal decentralization” we understand the assignment of fiscal responsibilities to the lower levels of government, that is, the degree of regional (local) autonomy and the authority of local government to decide upon its own expenditure and its ability to generate local revenues.

Pernyataan Slinko memertegas pengertian desentralisasi fiskal, yaitu sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.

Tujuan penerapan adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah dapat bekerja dengan lebih baik (efisien) dalam kondisi tersebut (M. Ryaas Rasyid, 2005).

Menurut Prawirosetoto (2002), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public services*).

Ada dua keuntungan yang dapat dicapai dari penerapan desentralisasi fiskal (Ebel dan Yilmaz, 2002), antara lain:

1. Efisiensi dan alokasi sumber-sumber ekonomi

Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah mampu memperoleh informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan pemerintah pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan kebutuhan/pilihan masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan bila dilakukan oleh pemerintah pusat.

2. Persaingan antara pemerintah daerah

Penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah berkompetisi dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih baik. Karena dalam sistem desentralisasi fiskal, warga negara menggunakan metode “*vote by feel*” dalam menentukan barang publik di wilayah mana, yang akan dimanfaatkan.

2.1.1.2 Indikator Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Ebel dan Yilmaz (2002) menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variables*) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga *size variables* yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP.

Lebih lanjut Ebel dan Yilmaz (2002) bahwa baik penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah bukanlah indikator yang sempurna untuk mengukur desentralisasi fiskal. Slinko (2002) memberikan penjelasan yang lengkap mengenai hal ini.

The problem with the expansive decentralization is that local government usually does not have real degree of autonomy but act on behalf of the regional and federal governments. We also have problems with the revenue side estimation of fiscal decentralization since those also could be not the consequence of municipal ability to rise and assign taxes, but the consequence of the revenue-sharing policy of regional government.

Meskipun kedua variabel tersebut bukanlah indikator desentralisasi fiskal yang sempurna, penelitian ini akan menggunakan *share* penerimaan daerah (Penerimaan Asli Daerah, PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD) untuk mengukur kemandirian fiskal daerah (derajat desentralisasi daerah). Pemilihan sisi penerimaan sebagai indikator untuk mengukur desentralisasi fiskal dikarenakan keterbatasan data yang tersedia dari sisi pengeluaran.

2.1.1.2.1 Penerimaan Daerah

Dalam mengalokasikan pembelajaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sector apa yang akan dibelanjakan (kecuali transfer DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus). Menurut UU No. 25 Tahun 1999 jo UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan (Hanif Nurcholis, 2005).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim dalam Erlangga A. Landiyanto (2005), cirri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelolah pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakab perimbangan keuangan pusat dan daerah.

PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas. Jadi keinginan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi adalah legal dengan tetap memenuhi prinsip keuangan negara (perpajakan) agar pajak dan retribusi daerah tidak distortif dan menyebabkan inefisiensi ekonomi (Robert A. Simanjuntak, 2005).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntunga selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan aspek pendapatan yang paling utama dalam PAD karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan antara pusat dan daerah di bidang desentralisasi fiskal. Melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH), dibagi menjadi dua, yaitu:

➤ Dana Bagi Hasil Pajak

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal (11) disebutkan bahwa bagian daerah dari bagi hasil pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) perorangan dalam negeri.

➤ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, panas bumi, pertambangan umum (seperti batu bara, nikel, emas, dsb), hasil hutan dan hasil perikanan. Bagi hasil dilakukan antara pusat dengan daerah dimana SDA itu berada. Jadi, jadi daerah yang tidak memiliki SDA atau yang tidak

berada dalam satu propinsi dengan daerah kaya, pada dasarnya tidak akan memperoleh bagian (Robert A. Simanjuntak, 2005).

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Tujuan pengalokasian DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan public diantara pemerintah daerah di Indonesia. Secara implisit, DAU bertujuan untuk menetralkan dampak peningkatan ketimpangan antar daerah sebagai akibat bagi hasil pajak dan SDA yang tidak merata. DAU untuk satu wilayah dialokasikan atas dasar celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar (Robert A. Simanjuntak, 2005).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana perimbangan yang berasal dari APBN (Hanif Nurcholis, 2005). Kriteria umum DAK adalah pembiayaan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan formula DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional di daerah, dimana sumbernya dinyatakan secara spesifik. DAK dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak semua bentuk pelayanan daerah bias dituangkan dalam bentuk formula dan variable-variabelnya sebagaimana halnya DAU.

d. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat (Hanif Nurcholis, 2005). Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar

negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

2.1.1.2.2 Pengeluaran Pemerintah

Penerapan otonomi daerah pada tahun 2001 mengakibatkan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah yang awalnya adalah manifestasi dari pemerintah pusat dan bertindak atas perintah dari pusat, dengan diberlakukannya otonomi daerah berubah menjadi sebuah pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab otonom untuk mengatur wilayahnya (berdasarkan kebutuhan wilayah), dalam koridor hukum yang telah ditentukan. Hal ini tercatat dalam *European Charter of Local Self Government* dalam Bailey (1999):

Local self government denotes the right and the ability of local authorities, within the limits of the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs under their own responsibility and in the interest of the local population...local authorities shall be entitled within national economic policy to adequate financial resources of their own, of which they may dispose freely within the framework of their powers.

Sehingga dengan sistem otonomi daerah tiap wilayah kabupaten/kota dapat menyediakan berbagai pelayanan publik yang beragam, sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah haruslah berdasarkan pada prinsip efisiensi, agar sistem otonomi ini dapat berjalan dengan optimal (M. Suparmoko, 2002). Dalam UU No. 32 Tahun 2004, wewenang pemerintah pusat meliputi enam bidang, yaitu: politik luar negeri, pertahanan,

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sementara wewenang pemerintah daerah adalah: (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) penanganan bidang kesehatan; (6) penyelenggaraan pendidikan; (7) penanggulangan masalah sosial; (8) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (9) fasilitas pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah; (10) pengendalian lingkungan hidup; (11) pelayanan pertanahan; (12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (13) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (14) pelayanan administrasi penanaman modal; (15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; (16) urusan wajib lainnya yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan.

Pengeluaran pemerintah harus dilakukan guna membiayai berbagai aktifitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya (M.R. Khairul Muluk, 2005). Menurut Guritno Mangkoesobroto (2001) ada 3 fungsi pemerintahan, yaitu:

1. **Fungsi alokasi**, yaitu fungsi pemerintah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi (barang publik, barang swasta, barang campuran) dilaksanakan secara efisien;
2. **Fungsi distribusi**, yaitu fungsi pemerintah untuk mewujudkan distribusi pendapatan atau kekayaan yang merata;

3. **Fungsi stabilitas**, yaitu fungsi pemerintah untuk menjaga kestabilan kondisi perekonomian, karena perekonomian yang diserahkan kepada pasar akan rentan terhadap guncangan (inflasi dan deflasi).

Menurut M. Suparmoko (1994), pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan tujuannya, yaitu: (1) *exhaustive*, yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk mengalihkan sector-sector produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah (berupa pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain); (2) *transfer payment*, yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk memindahkan daya beli dari unit ekonomi yang satu ke unit ekonomi yang lain, dan menyerahkan keputusan penggunaan daya beli tersebut pada unit terakhir (dapat berupa pemindahan daya beli pada individu untuk kepentingan sosial, pada perusahaan sebagai subsidi, maupun pada pemerintah sebagai hibah/*grants*)

2.1.1.2.3 Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah

Dalam mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sector apa yang akan dibelanjakan (kecuali transfer DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus) yang dituangkan dalam APBD. APBD pada dasarnya memuat rancangan keuangan yang diperoleh dan dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya untuk

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum selama satu tahun anggaran.

2.1.1.3 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

2.1.1.3.1 Teori Musgrave dan Rostow

Musgrave dan Rostow dalam Mangkunsoebroto (1998) mengembangkan model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah, yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi.

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari negara tersebut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana publik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap menengah ini peranan pemerintah masih tetap besar karena peranan swasta yang semakin besar ini akan banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga pemerintah harus banyak menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan kualitas yang lebih baik. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Musgrave dan Rostow pada tahap lanjutan pembangunan ekonomi,

investasi swasta dalam persentase GNP semakin besar, dan investasi pemerintah dalam persentase GNP semakin kecil. Melalui teori ini Musgrave dan Rostow berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah akan beralih dari penyediaan barang dan jasa publik menjadi pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas social, misalnya program kesehatan hari tua, program kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow ini adalah suatu pandangan yang di dasarkan pada pengamatan-pengamatan di banyak Negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu.

2.1.1.3.2 Hukum Wanger

Wagner dalam Mangkusobroto (1998) mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga di dasarkan pula pengamatan di Negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukum, sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Wagner menyadari dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industry, industry dan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini Wanger menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum,

pedidikan, rekreasi, dan sebagainya. Hukum Wanger dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{P_kPP_1}{PPK_1} < \frac{P_kPP_2}{PP_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n} \quad (1)$$

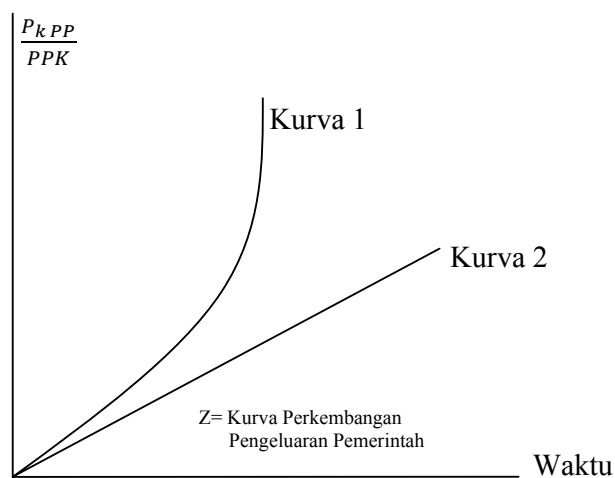
Keterangan:

P_kPP = Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK = Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,..n = jangka waktu (tahun)

Hukum Wanger ini ditunjukkan dalam diagram berikut di mana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1, dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh kurva 2



Gambar 2.1
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wanger

Sumber : Guritno Mangkoesoebroto, 1998

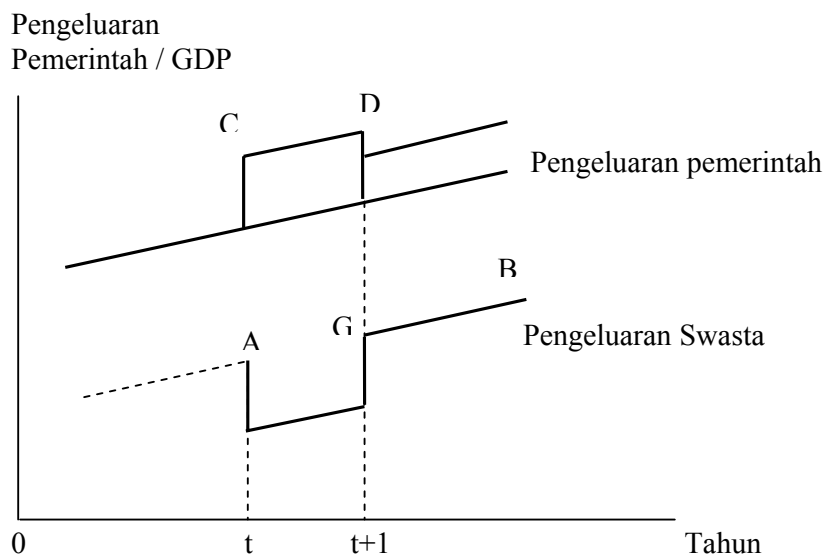
2.1.1.3.3 Teori Peacock dan Wiseman

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Menurut Peacock dan Wiseman (Mangkusoebroto, 1998) masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat

Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.

Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala. Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa mencari pinjaman untuk membiayai perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karena itu pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai. Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat

pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang



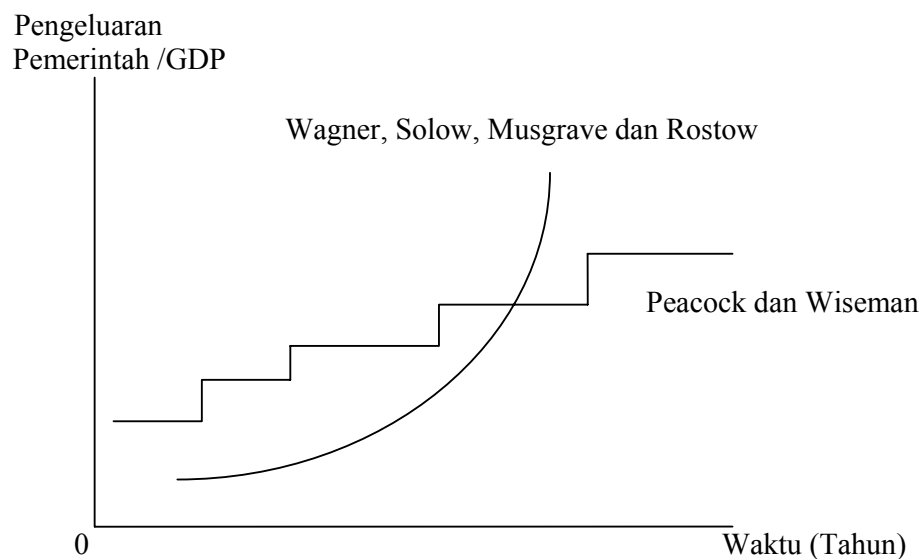
Gambar 2.2
Teori Peacock dan Wiseman

Sumber: Guritno Mangkoesebroto, 1998

Dalam keadaan normal dari tahun t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam peresentase terhadap GNP (atau GDP) naik sebagaimana ditunjukkan oleh garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang, maka pengeluaran pemerintah naik sebesar AC dan kemudian naik seperti yang ditunjukkan segmen CD. Setelah perang selesai (pada tahun $t+1$), pengeluaran pemerintah tidak turun ke G, yaitu tingkat perkembangan pengeluaran pemerintah apabila tidak terjadi perang. Hal ini disebabkan karena pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk membayar

pinjaman pada saat perang, seperti yang sudah dijelaskan pada awal penjelasan teori ini.

Efek atau akibat lain dari adanya suatu gangguan sosial adalah apa yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*) yang timbul karena masyarakat sadara akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah setelah gangguan sosial tersebut. Misalnya, setelah perang selesai timbul masalah, banyaknya yatim piatu, prajurit cacat, veteran, dan sebagainya yang tidak terjadi sebelum adanya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus bertindak untuk menangani masalah tersebut dan masyarakat pun dapat memaklumi tindakan pemerintah tersebut sehingga toleransi pajak pun meningkat.



Gambar 2.3
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Sumber : Guritno Mangkoesobroto, 1998

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Setiap negara di dunia ini sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor yang paling penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara untuk jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup (*standar of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat.

“*Economic Development is Growth Plus Change*” yang berarti pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak (Sukirno, 1994). Simon Kuznets dalam Sukirno, mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu peningkatan bagi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan (Sukirno, 1995). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh factor-faktor produksi yang selalu meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Robinson Tarigan (2004) secara khusus menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi wilayah (daerah) sebagai pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah (daerah) tersebut. Pertambahan pendapatan ini diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan).

Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan penduduk di negara-negara lain (Sadono Sukirno, 2004).

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa (Todaro, 2003). Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia;
2. Pertumbuhan penduduk, yang akan meningkatkan jumlah angkatan kerja;
3. Kemajuan teknologi

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Boediono (1992) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, duapuluh, limapuluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal perekonomian itu,

artinya artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dipertimbangkan PDRB riil satu tahun ($PDRB_t$) dengan PDRB riil tahun sebelumnya ($PDRB_{t-1}$), atau dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi (PE)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \% \quad (2)$$

Untuk mengukur laju pertumbuhan rata-rata per tahun digunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{r} = \left(\left(\sqrt[n]{\frac{T_n}{T_0}} \right) \right) \times 100 \quad (3)$$

dimana :

- r = Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata
- n = Jumlah Tahun (dihitung mulai dengan sampai dengan)
- T_n = Data PDRB tahun sebelumnya
- T_0 = Data PDRB tahun tertentu

Menurut Michale P. Todaro (2004) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, antara lain:

- a. Akomodasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia
- b. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak akumulasi capital
- c. Kemajuan teknolog

Todaro dan Smith (2003) menjelaskan beberapa pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi, yaitu: teori tahapan linier dan pembangunan sebagai pertumbuhan; model perubahan struktural; revolusi ketergantungan internasional.

2.1.2.2.1 Teori Tahapan Linier dan Pembangunan Sebagai Pertumbuhan

Ada dua teori yang dapat dikelompokkan dalam teori tahapan linier dan pembangunan sebagai pertumbuhan, yaitu teori pertumbuhan Rostow, dan teori pertumbuhan Harrod-Domar.

2.1.2.2.1.1 Teori Pertumbuhan Rostow

Teori ini bertolak dari lingkungan intelektual yang masih steril dan dipacu oleh politik Perang Dingin yang berkobar pada masa tersebut. Model pembangunan tahap pertumbuhan (*stages-of-growth model development*) merupakan hasil pemikiran dari seorang ahli sejarah ekonomi dari Amerika Serikat yaitu Walt W. Rostow. Menurut ajaran Rostow, perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam satu seri tahapan yang harus dilalui oleh setiap negara. Adapun tahapan tersebut adalah: (1) Tahapan perekonomian tradisional; (2) Tahapan pra kondisi tinggal landas; (3) Tahapan tinggal landas; (4) Tahapan menuju kedewasaan; (5) Tahapan konsumsi massa tinggi.

2.1.2.2.1.2 Teori Pertumbuhan Harrod Domar

Setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang telah

susut atau rusak. Namun, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto atau stok modal (*capital stock*).

Adapun asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah:

1. Perekonomian dalam keadaan *full employment* dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh
2. Berlangsung dalam dua perekonomian sektor (sektor rumah tangga dan sektor perusahaan)
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik origin (0)
4. Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save, MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antar modal dan output (*Incremental Capital Output Ratio*).

Diasumsikan juga terdapat hubungan ekonomi langsung antara besarnya total stok modal (K), dengan GNP total (Y). setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GNP (Todaro dan Smith, 2003).

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \quad (4)$$

Persamaan tersebut merupakan bentuk sederhana dari teori pertumbuhan Harrod-Domar. Persamaan tersebut menjelaskan secara jelas bahwa tingkat pertumbuhan GNP ($\Delta Y/Y$) ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional

(s), serta rasio modal output nasional (k). secara lebih spesifik, persamaan tersebut mentakan bahwa tanpa adanya intervensi pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional berbanding lurus dengan rasio tabungan (semakin besar bagian GNP yang ditabung atau diinvestasikan, maka pertumbuhan GNP yang akan dihasilkan menjadi lebih besar), dan berbanding terbalik dengan rasio modal output di suatu perekonomian (semakin besar rasio modal-output nasional (k), maka tingkat pertumbuhan ekonomi semakin rendah). Jadi berdasarkan teori Harrod-Domar agar dapat tumbuh dengan pesat, maka setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin GNP-nya. Akan tetapi tingkat pertumbuhan aktiva yang dapat dijangkau pada tiap tingkat tabungan dan investasi juga bergantung pada produktivitas investasi tersebut.

2.1.2.2.2 Model Perubahan Struktural

Teori ini memusatkan pada mekanisme yang memungkinkan negara-negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern. Salah satu model teori perubahan structural yang paling terkenal adalah Model-dua-Sektor, yang dicetuskan oleh Arthur Lewis. Ia membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu sektor tradisional dan sektor industry dan menyatakan bahwa sektor industry akan menyerap surplus tenaga kerja di sektor tenaga kerja, sehingga akan terjadi keseimbangan (*equilibrium*) di kedua sector, dan terjadi peningkatan upah riil di sektor tradisional.

2.1.2.2.3 Revolusi Ketergantungan Internasional

Pada intinya teori ini memandang Negara-negara di dunia ketiga sebagai korban kekakuan aneka factor kelembagaan, politik dan ekonomi, baik yang berskala domestic maupun internasional. Ada tiga aliran pemikiran dari model ini, yaitu: model ketergantungan neocolonial, model paradigma palsu, dan tesis pembangunan dualistik.

2.1.3 Ketimpangan Wilayah

2.1.3.1 Defenisi Tentang Ketimpangan Wilayah

Perbedaan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang analog dengan kesenjangan sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan sehingga muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang dikotomis dalam hal ini (Kuznet, 1955) mengemukakan suatu hipotesis yang di kenal dengan sebutan *U Hypothesis*, hipotesa ini dihasilkan lewat kajian empiris terhadap pola pertumbuhan ekonomi terhadap *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan.

Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi maka setelah mencapai tahap tertentu *trade off* tersebut akan menghilang diganti dengan hubungan kolerasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan yang disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional

meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan sektor tradisional. Berdasarkan tingkat kemajuannya wilayah-wilayah dalam suatu negara dapat di kelompokkan sebagai berikut (Hanafiah, 1998) yaitu:

1. Wilayah terlalu maju terutama kota-kota besar dimana terdapat batas pertumbuhan atau polarisasi, umpamanya dalam menghadapi masalah *diseconomies of scale* yang menyebabkan masalah manajemen, kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya fasilitas pelayanan umum, kenaikan gaji dan upah, kenaikan harga bahan baku energi, peningkatan ongkos sosial.
2. Wilayah netral di cirikan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, tidak ada kesesakan dan tekanan ongkos sosial dan merupakan kota satelit bagi wilayah yang terlalu padat.
3. Wilayah sedang merupakan wilayah dengan ciri-ciri campuran pola distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif baik yang merupakan gambaran kombinasi antara daerah maju dan kurang maju dimana terdapat juga pengangguran dan kelompok masyarakat miskin.
4. Wilayah kurang berkembang atau kurang maju yan merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan jauh di bawah tingkat pertumbuhan nasional dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat mengejar pertumbuhan dan pembangunan nasional seperti daerah-daerah konsentrasi industri yang sudah mundur.
5. Wilayah tidak berkembang merupakan wilayah tidak maju atau wilayah miskin dimana industri modern tidak pernah dapat berkembang dalam

berbagai skala umumnya di tandai dengan daerah pertanian dengan usaha tani subsisten dan kecil, berpenduduk jarang dan tersebar dan tidak terdapat kota atau konsentrasi pemukiman yang relatif besar.

2.1.3.2 Teori Ketimpangan Wilayah

Berikut ini akan dijelaskan dua teori ketimpangan wilayah, yaitu *Trickling Down Effect* dan *Polarization Effect*; serta *Backwash-Spread Effect*.

2.1.3.2.1 *Trickling Down Effect* dan *Polarization Effect*

Albert O. Hirschman (1970) dalam tulisannya yang berjudul *Interregional and International Transmission of Economic Growth* membedakan daerah di suatu negara menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*trickling down effect*). Sedangkan perbedaan antara kedua daerah tersebut melebar berarti terjadi imbas yang kurang baik, atau terjadi proses pengkutuban (*polarization Effect*).

2.1.3.2.2 *Spread Effect* dan *Backwash Effect*

Myrdal dalam Jinhana (1990) menyatakan bahwa ketimpangan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan berkaitan erat dengan system kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif inilah yang

mendorong pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki “harapan-laba-tinggi”, sementara wilayah-wilayah yang lain menjadi terlantar.

Myrdal menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya melalui dampak baik (*backwas effect*) dan dampak sebar (*spread effect*). *Backwash effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan terjadinya perpindahan sumber daya (tenaga kerja, modal, dll) dari wilayah di sekitarnya (mis: wilayah B). Sehingga wilayah A (yang awalnya merupakan wilayah yang lebih maju dibandingkan wilayah B), akan semakin maju dan wilayah B akan semakin tertinggal. *Spread effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (mis: wilayah A) mengakibatkan pertumbuhan wilayah disekitarnya (mis: wilayah B), yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di sentra-sentra tersebut, dan sentra-sentra yang mempunyai industri barang-barang konsumsi akan terangsang. Selanjutnya Myrdal menyimpulkan ketimpangan wilayah disebabkan oleh lemahnya dampak sebar (*spread effect*) dan kuatnya dampak balik (*backwash effect*).

2.1.3.3 Kebijakan Otonomi Daerah

Ketimpangan antara pusat dan daerah telah memacu lahirnya otonomi sehingga paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi model pembangunan yang desentralistik.

Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan adanya undang-undang No. 22 Tahun 1999 (UU No. 32 Tahun 2004, revisi) tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No. 25 Tahun 1999 (UU No. 33 Tahun 2004, revisi) tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, pelimpahan kewenangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap cara-cara mempertanggungjawabkan keuangan pusat dan daerah.

2.1.3.4 Pengukuran Ketimpangan Wilayah

Banyak perhatian telah diberikan terhadap bagaimana distribusi pendapatan berubah dalam masa pembangunan).

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah. Beberapa ukuran yang sering digunakan antara lain adalah: Indeks Williamson dan Entrophy Theil.

2.1.3.4.1 Indeks Williamson

Indeks Williamson mengukur dispersi tingkat pendapatan per kapita daerah relatif terhadap rata-rata pendapatan nasional. Rumusan Indeks Williamson tersebut adalah (Susiyanti B. Hirawan, 2006) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{y} \quad (5)$$

Dimana :

y_i = PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota

y = PDRB per kapita propinsi
 f_i = Jumlah penduduk di wilayah i
 n = Jumlah penduduk nasional

2.1.3.4.2 Indeks Entropi Theil

Indeks entropi theil dapat digunakan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama kurun waktu tertentu; sedang yang kedua juga penting untuk mengkaji gambaran yang lebih rinci tentang ketimpangan spasial. Sebagai contoh ketimpangan antar wilayah dalam suatu Negara. (Mudrajad Kuncoro, 2004). Rumus dari Indeks Entropi Theil adalah sebagai berikut:

$$I = \sum \left(\frac{Y_j}{Y} \right) x \log \left[\frac{\left(\frac{Y_j}{Y} \right)}{\left(\frac{x_j}{X} \right)} \right] \quad (6)$$

Dimana:

$I(y)$ = Indeks Entropi Theil
 y_j = PDRB per kapita wilayah j
 Y = rata-rata PDRB per kapita wilayah
 x_j = jumlah penduduk wilayah j
 X = jumlah penduduk nasional

2.1.3.4.3 Indeks Ketimpangan Jamie Bonet

Dalam penelitiannya tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan antar wilayah, Bonet (2006) merumuskan cara mengukur ketimpangan antar wilayah sebagai berikut:

$$I_{i,t} = \left| \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1 \right| \quad (7)$$

Dimana:

I = ketimpangan wilayah i pada tahun t
 $PCGDP_{i,t}$ = PDRB per kapita wilayah i , pada tahun t
 $PCGDP_{NAL,t}$ = PDRB per kapita nasional pada tahun t

Rumus tersebut menyatakan bahwa kesetaraan sempurna terjadi pada saat PDRB per kapita wilayah sama dengan PDRB per kapita nasional. Oleh karena itu, ketimpangan wilayah diukur dari selisih antara PDRB per kapita relative (wilayah terhadap nasional) dan 1 (kondisi kesetaraan sempurna), yang diabsolutkan.

2.1.4 Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan

Dalam konteks negara kesatuan desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak meliputi kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk membiayai pelayanan publik yang menjadi tugas daerah. Defenisi desentralisasi fiskal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Davey (2003) bahwa:

Fiscal decentralisation is the division of public expenditure and revenue between levels of government, and the discretion given to regional and local government to determine their budgets by levying taxes and fees and allocating resources

Disisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan

efektif. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat yang jauh. Sehingga alokasi sumber dayayang dilakukan oleh Pemda akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan disisi pendapatan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat f pada pemerintah keuntuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Menurut Pose et all (2007), terdapat banyak litetatur yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejaterahan dan keuntungan ekonomi. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemerintah daerah (dengan asumsi lebih dekat dengan rakyat) lebih cakap dalam membuat kebijakan yang menentukan barang publik yang dibutuhkan di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah menghasilkan fungsi alokasi yang lebih efisien. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ebel dan Yilmaz (2002), Slinko (2002), dan Vasquez dan Mc Nab (2001).

World Bank (1997) menyatakan desentralisasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonoi secara tidak langsung. Ada tiga cara desentralisai fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Argumen pertama adalah desentralisasi akan meningkatkan efisiensi pengeluaran publik, sehingga efek dinamisnya akan mempengaruhi pertubuhan ekonomi. Oleh karena itu teradapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi. Selanjutnya bahwa desentralisasi dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi,

yang mana akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga didapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi. Argumen yang berikutnya adalah bahwa negara sedang berkembang (NSB) memiliki sistem kelembagaan dan perekonomian yang berbeda dengan negara berkembang (NB), sehingga negara sedang berkembang tidak akan mendapat keuntungan dari desentralisasi. Hal ini terjadi karena susunan kelembagaan di negara-negara sedang berkembang tidak perlu memberikan sub insentif kepada pemerintah untuk menggunakan keuntungan informasi dalam merespon tindakan yang dilakukan. Alasan lain adalah karena pemerintah daerah di negara-negara sedang berkembang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, seperti misalnya pegawai pemerintah yang terlatih dalam mengelola anggaran yang lebih besar.

Vasquez dan Mc Nab (2001) memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap efisiensi dan stabilitas makroekonomi mampu mempengaruhi pertumbuhan.

Yang pertama tentang pengaruh efisiensi terhadap pertumbuhan. *National account* (PDB/PDRB) mengukur output pemerintah berdasarkan tingkat pengeluaran, tanpa melihat tingkat pemerintah mana yang menegeluarkannya. Tapi bila pada tingkat pengeluaran yang sama, pemerintah daerah (yang dalam sistem desentralisasi diberikan kewenangan dalam mengatur pengeluaran) mampu menghasilkan output yang lebih besar (atau lebih berkualitas) dibandingkan pemerintah pusat, maka terciptalah efisiensi produksi yang lebih besar di tingkat pemerintah daerah. Akhirnya, kuantitas dan kualitas yang lebih

baik dari pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah aka menghasilkan peningkatan pendapatan.

Selanjutnya mengenai dampak stabilitas terhadap terhadap stabilitas makroekonomi. Meskipun jelas bahwa tidak ada hubungan antara desentralisasi dan stabilitas makroekonomi, namun sudah menjadi kesepakatan umum bahwa sistem desentralisasi yang tidak dirancang dengan baik dapat mengakibatkan ketidakstabilan makroekonomi (mis: mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman, tanpa adanya kontrol dari pemerintah pusat) (Vasquez dan Mac Nab, 2001).

2.1.5 Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan

Dalam konteks desentralisasi, masalah redistribusi memiliki dua dimensi, yaitu kesetaraan horizontal (antar wilayah) dan kesetaraan di dalam wilayah. Kesetaraan horizontal mengacu pada kondisi dimana pemerintah daerah memiliki kapasitas yang sama dalam penyediaan barang publik (Ebel dan Yilmaz, 2002). Ada dua faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan horisontal, yaitu *tax base* yang sangat berbeda antara wilayah dan karakteristik wilayah, dimana kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi penentuan biaya dan penyediaan barang publik.

Hubungan yang positif antara ketimpangan wilayah dan desentralisasi fiskal merupakan pendapat yang mendominasi diantara peneliti. Tibout dalam

Slinko (2002) menjelaskan hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan wilayah melalui sifat mobilitas wajib pajak, dimana masyarakat (wajib pajak) memiliki kemampuan “*voting by feet*” (dapat secara bebas) dalam memilih wilayah mana yang akan ditempati melalui dua pertimbangan yaitu selera dan besarnya pengenaan pajak di daerah tersebut. Sehingga wilayah yang lebih maju (*wealth regions*) dengan fasilitas dan pelayanan public yang lebih baik akan lebih menarik untuk dijadikan tempat tinggal dibandingkan dengan wilayah yang kurang maju (*poor regions*).

2.1.6 Ketimpangan versus Pertumbuhan

Ada teori yang mengatakan ada *tradeoff* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam decade belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan yang rendah. Di banyak NSB tidak ada *tradeoff* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan.

Jeffrey Williamson dalam Mudrajad Kuncoro (1997) , menyatakan bahwa pada abad ke-19 di Amerika ketidakmerataan yang timbul berdampak sedikit pada akumulasi modal dan untuk Inggris bahkan tidak memberikan dampak sama sekali. Namun ketidakmerataan yang timbul memegang peranan penting dalam sulitnya akumulasi modal SDM.

Ada berbagai cara pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketidakmerataan. Menurut Fields dalam Kuncoro (1997) ada tidaknya *tradeoff* antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan tergantung pada jenis data yang digunakan.

2.1.6.1 Studi Dengan Data Silang Tempat (*cross section*)

Studi dengan data silang tempat paling populer digunakan. Simon Kuznetz (1955) diakui sebagai pelopor studi komparatif dalam distribusi pendapatan dengan menggunakan data silang tempat (*cross section*). Menurut Fei dan Ranis (1964), Kuznet (1966), Adelman dan Morris (1973), berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan ditentukan oleh jenis pembanguana ekonomi, yang ditunjukkan oleh ukuran Negara, dasar sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain factor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi.

Adapun ahli ekonomi pembangunan yang melakukan riset yang sama tentang ketimpangan pendapatan adalah Kravis (1970), Oshina (1962), Chenery dan Sirquin (1975), Ahluawalia, Charter, dan Chenery (19179). Studi-studi empiris tersebut mendukung hasil penelitian Kuznet tentang kurva U terbalik, dimana ditemukan bukti bahwa hamper separuh variasi distribusi pendapatan dapat dijelaskan oleh tingkat pendapatan nasional.

2.1.6.2 Studi Dengan Data Runtut Waktu (*time series*)

Studi empiris pertama yang menggunakan data runtut waktu dilakukan oleh weisskoff (1970) yang mengamati perubahan dan pola distribusi pendapatan di tiga Negara Amerika Latin, yaitu Argentina, Meksiko, dan Puerto Rico. Studi yang dilakukan oleh Fishlow (1972) menunjukkan bahwa sukses ekonomi makro di Brazil ternyata tidak diikuti dengan membaiknya distribusi pendapatan.

Studi yang kompresif yang dilakukan oleh Fields (1980) menemukan fakta Nyaitu: (1) negara yang mengalami kenaikan ketimpangan pendapatan ternyata kurang lebih sama dengan negara yang mengalami penurunan ketimpangan pendapatan; (2) Kemiskinan absolute menurun diberbagai Negara; (3) Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan banyak yang berjalan beriringan. Dengan demikian jawaban atas pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan tergantung pada fokus perhatian diarahkan pada kemiskinan atau ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kendati pertumbuhan ekonomi yang cepat umumnya dapat menurunkan kemiskinan, tetapi tidak berarti pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi maupun ketimpangan antar wilayah telah banyak dilakukan oleh peneliti. Beberapa diantaranya terdapat pada tabel penelitian sebagai berikut:

TABEL 4.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Tujuan	Model Persamaan	Metode Analisis	Hasil Empiris
1	Gary M. Woller dan Kerk Phillips (1998)	Mengetahui hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi	$Y = \alpha + \beta_y y + \beta_z z + \beta_x x + \varepsilon$ <ul style="list-style-type: none"> • Y = tingkat pertumbuhan per kapita • y = 4 kontrol variable, yang terdiri dari tingkat GDP perkapita (RGDPC), rasio investasi terhadap GDP (INVGDP), akumulasi modal manusia (EDU), tingkat pertumbuhan populasi (GPOPP). • z = ukuran desentralisasi fiskal, yang terdiri dari rasio penerimaan pemerintah terhadap penerimaan total pemerintah (REVOT), rasio penerimaan pemerintah local dikurangi subsidi terhadap penerimaan total pemerintah (REVGNI), rasio pengeluaran pemerintah local terhadap pengeluaran pemerintah (EXPTOT), rasio dari pengeluaran pemerintah lokal terhadap pengeluaran total pemerintah dikurangi pengeluaran social dan pertahanan (EXPNDEV). • x = variable control lanilla, terdiri dari jumlah impor dan ekspor terhadap GDP, jumlah total aset 	Ekonometrika: Metode <i>fixed effects</i> dengan data 23 negara sedang berkembang (kategori IMF) sepanjang tahun 1974 – 1991.	Terdapat hubungan yang lemah antara tingkat penerimaan desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi.

			dan tanggung jawab bank asing terhadap GDP, tingkat inflasi didasarkan pada GDP deflator, perubahan inflasi untuk jangka waktu tertentu, indeks tekanan politik, indeks kebebasan sipil, nilai tukar mata uang riil, kredit domestic.		
2	Jing Jin dan Heng-fu Zou (2000)	Menganalisa bagaimana alokasi penerimaan dan pengeluaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di China	$Y = \beta_1 + \beta_2 L_{it} + \beta_3 TAX_{it} + \beta_5 F_{it} + \beta_6 R_{it} + \beta_7 I_{it} + \beta_8 DC_{it}$ <p> Y = pertumbuhan pendapatan propinsi L = pertumbuhan tenaga kerja TAX = pajak F = derajat keterbukaan ekonomi R = tingkat inflasi I = investasi DC (desentralisasi fiskal) diukur melalui desentralisasi penerimaan, desentralisasi pengeluaran, dan transfer antar pemerintah. </p>	<p> Ekonometrika: Metode OLS menggunakan data panel 28 propinsi di China periode 1980-1992 </p>	<p> Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal berhubungan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi (propinsi) dalam 12 tahun terakhir </p>
3	Irina Slinko (2002)	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui dampak desentralisasi 	$Y = \alpha + \gamma_t + \beta^* X_{it} + \gamma^* Z_{it} + \mu_{it}$ <p> Y (regional inequality) diukur melalui indeks gini </p>	<p> Ekonometrika: Metode OLS menggunakan data </p>	<ul style="list-style-type: none"> Redistribusi (transfer) mengurangi gap

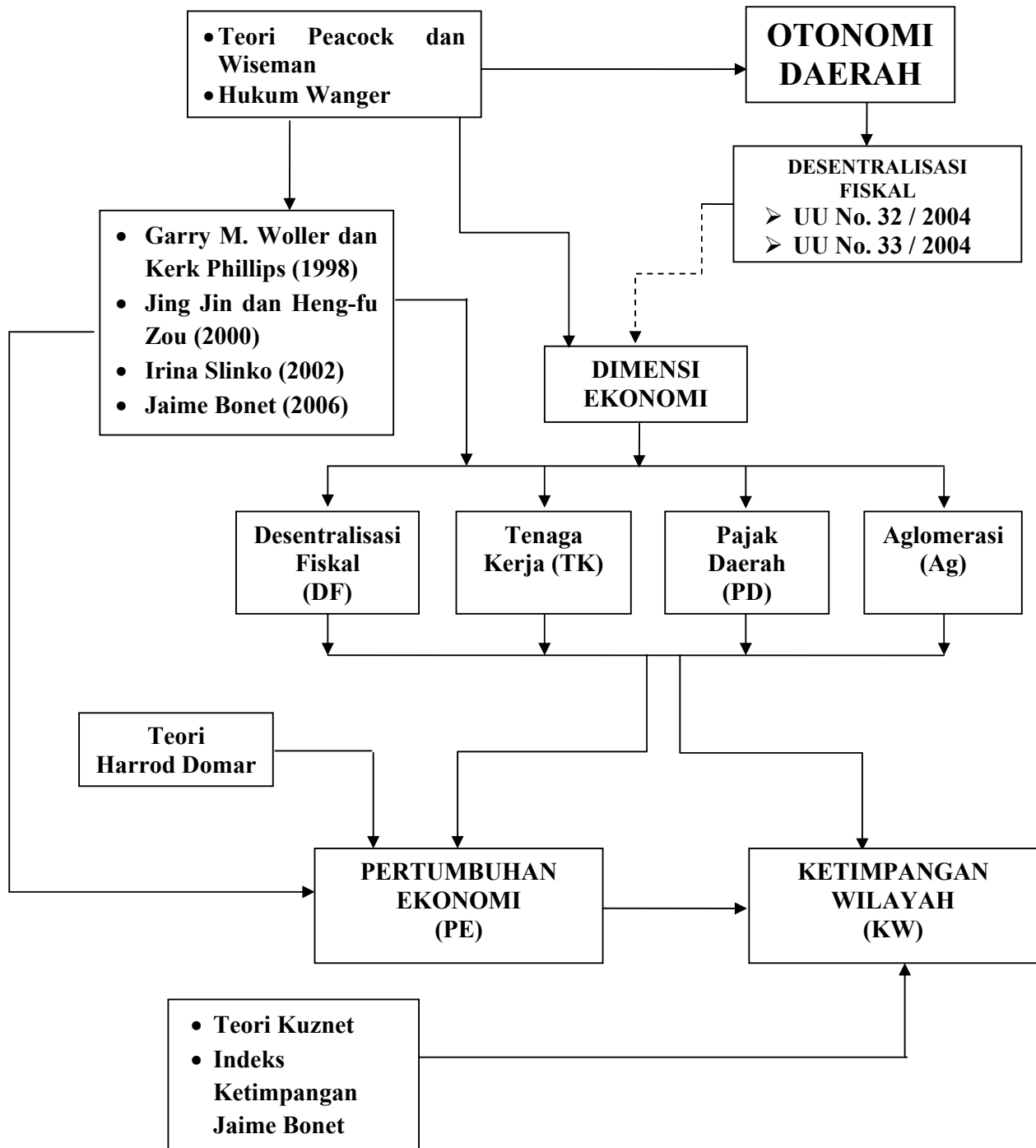
		<p>terhadap ketimpangan wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap wilayah miskin • Menganalisis apakah kinerja perekonomian wilayah miskin mendominasi dampak pertumbuhan wilayah secara keseluruhan 	<p>dari: total revenue; total expenditure; grand total expenditure; own revenue X (fiscal decentralization):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Share local expenditure in total budget expenditure 2. Share local revenue in total budget revenue 3. Share intergovernmental transfer in total revenue 4. Rasio fragmentasi <p>Z = konsentrasi industri</p>	<p>panel 33 kabupaten/kota di Russia, periode 1996-1999</p>	<p>kesejahteraan antar wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan subsidi yang diberikan pemerintah pusat untuk wilayah miskin, sehingga meningkatkan ketimpangan antar wilayah • Ketimpangan anggaran penerimaan antar wilayah tidak berhubungan negative dengan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan
4	Jaime Bonet (2006)	Menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan	$I_{it} = \beta_1 + \beta_2 FD_{it} + \beta_3 CV_{it} + \mu_{it}$ $I_{it} = \left \frac{PCGDP_{it}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1 \right $ <p>FD diukur dari: pengeluaran pemerintah per kapita, pengeluaran sebagai persentase dari GDP, share</p>	<p>Ekonometrika : Metode OLS menggunakan data 5 propinsi di Kolombia periode</p>	<p>Desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pendapatan antar</p>

		pendapatan antar wilayah	pengeluaran daerah terhadap pengeluaran total. CV (<i>control variable</i>) = <ul style="list-style-type: none">• Aglomerasi (share GDP daerah terhadap total GDP)• Liberalisasi Perdagangan (share total perdagangan Luar negeri terhadap total GDP)	1990- 2000	wilayah
--	--	--------------------------	---	------------	---------

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka Pemikiran Teoritis penelitian ini, disajikan sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



Realisasi Perimbangan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terwujud melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah berjalan sejak tahun 2001 melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang mengatur tentang perimbangan wewenang dan perimbangan otoritas keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004.

Teori Peacock dan Wiseman serta Hukum Wanger mengasumsikan bahwa indikator desentralisasi fiskal merupakan merupakan dimensi ekonomi yang diambil dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dalam penelitian ini dimensi ekonomi yang dimaksud diambil dari penerimaan pemerintah agar nilai nominal dari variabel-variabel lebih valid dan realistis dengan asumsi penerimaan pemerintah digunakan secara keseluruhan sebagai pengeluarag pemerintah.

Variabel yang akan di teliti adalah pertama, pertumbuhan ekonomi yang nilainya diambil sesuai dengan penelitian Garry M. Woller dan Kerk Phillips (1998) dan sesuai dengan teori pertumbuhan Harrod Domar. Kedua, ketimpangan wilayah yang nilainya diambil sesuai dengan penelitian Jaime Bonet (2006) yaitu Indeks Ketimpangan Jaime Bonet dan sesuai denga teori Kuznet dimana pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi ketimpangan wialyah.

Variabel-variabe Independenl yang diambil adalah derajat desentralisasi fiskal, pajak daerah, jumlah tenaga kerja, dan aglomerasi yang ditentukan sesuai dengan penelitian terdahulu dalam penlitian ini serta juga disesuaikan dengan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara, tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan (kusmayadi dan sugiantoro, 2000), dalam arti hipotesis dapat diubah, diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Hal ini dimungkinkan karena hipotesis yang diperoleh tergantung pada masalah yang diteliti dan konsep yang digunakan. Maka hipotesis untuk penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi:

Hipotesis 1: diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang positif dari derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hipotesis 2: diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang negatif dari pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hipotesis 3: diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang positif dari tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hipotesis 4: diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang positif dari aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Hipotesis 5: diduga ada hubungan yang signifikan dari semua variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Ketimpangan Wilayah:

Hipotesis 1: diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang positif dari pertumbuhan ekonomi daerah terhadap ketimpangan wilayah

Hipotesis 2: diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang negatif dari derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah

Hipotesis 3: diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang negatif dari pajak daerah terhadap ketimpangan wilayah

Hipotesis 4: diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang negatif dari tenaga kerja terhadap ketimpangan wilayah

Hipotesis 5: diduga ada hubungan yang signifikan dan pengaruh yang positif dari aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah

Hipotesis 6: diduga ada hubungan yang signifikan dari semua variabel independen terhadap ketimpangan wilayah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel diartikan sebagai objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa dan fenomena-fenomena yang akan diteliti.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Dua variabel dependen (*dependent variable*), yaitu pertumbuhan ekonomi (PE) dan Ketimpangan Wilayah (KW)
- Variabel bebasnya (*independent variable*) antara lain: Desentralisasi fiskal (DF), Tenaga kerja (TK), Pajak Daerah (PD), dan Aglomerasi (Ag).

3.1.2 Defenisi Operasional

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (PE), berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi wilayah diukur melalui logaritma natural Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten/kota, dengan tujuan untuk menangkap perubahan relatif (dibandingkan tahun sebelumnya) dari PDRB per kapita. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB pendekatan produksi atas dasar

harga konstan tahun 2000. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah persen

b. Ketimpangan Wilayah

Dalam mengukur ketimpangan wilayah digunakan proksi sesuai dengan yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran kesenjangan wilayah pada konsep PDRB per kapita relative, dengan formula sebagai berikut:

$$KW_{i,t} = \left| \frac{PDRBPC_{i,t}}{PDRBPC_{Jabar,t}} - 1 \right| \quad (8)$$

Dimana:

KW_{it} = ketimpangan wilayah kabupaten/kota i, pada tahun t
 $PDRBPC_{it}$ = PDRB per kapita kabupaten/kota i, pada tahun t
 $PDRBPC_{Jabar,t}$ = PDRB per kapita Propinsi Jawa Barat, pada tahun t

PDRB per kapita Propinsi Jawa Barat diperoleh dari hasil bagi penjumlahan PDRB per kapita 25 kabupaten/kota pada Propinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. rumus tersebut menyatakan bahwa kesetaraan sempurna terjadi pada saat PDRB per kapita kabupaten/kota sama dengan PDRB per kapita Propinsi Jawa Barat.

c. Desentralisasi Fiskal

Mengikuti Jin dan Zou (2002) dan Slinko (2002) pengukuran derajat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

pendekatan penerimaan, yaitu mengukur derajat desentralisasi fiskal dari share penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah.

$$DF_{it} = \frac{PAD_{it}}{TPD_{it}} \times 100\% \quad (9)$$

Dimana:

DF_{it} = derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota i, pada tahun t

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota i, pada tahun t

TPD_{it} = Total Penerimaan Daerah kabupaten/kota i, pada tahun t

Semakin besar nilai DF, menunjukkan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Satuan dari variabel desentralisasi fiskal adalah persen.

d. Pajak Daerah (PD)

Pajak Daerah (PD) dalam penelitian ini didekati dengan rasio total pajak masing-masing kabupaten/kota sebagai persentase terhadap PDRB kabupaten/kota tersebut. Pendekatan ini mengikuti penelitian Jin dan Zou (2000). Satuan dari pajak daerah adalah persen.

e. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja (TK) digunakan untuk mewakili *resource* yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu wilayah. Dalam penelitian ini jumlah tenaga kerja yang dimaksud diukur dari jumlah angkatan kerja per tahun, per wilayah. Berdasarkan pengertian BPS, yang dimaksud dengan angkatan kerja

adalah penduduk usia 10 tahun ke atas, yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Variabel tenaga kerja adalah jiwa.

f. Aglomerasi

Mengikuti penelitian Bonet (2006), Aglomerasi (Ag) yang dimaksud adalah aglomerasi produk yang diproduksi dari *share* PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB propinsi Jawa Barat. ukuran ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemusatan aktivitas ekonomi pada 25 kabupaten/kota di Jawa Barat terhadap pertumbuhan ekonomi 25 kabupaten/kota tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu (Soeratno dan Arsyad, 2003)

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel (*pooling data*) atau data longitudinal. Data panel (data longitudinal) adalah sekelompok data individu yang diteliti selama rentang waktu tertentu.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Barat.

2. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Barat.
3. Data Total Penerimaan Daerah (TPD) pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Barat.
4. Data Pajak Daerah (PD) pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Barat.
5. Data Tenaga Kerja (TK) pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Barat.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dan teknik dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik analisa untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literature, dan lain-lain yang masih relevan, dan teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisa informasi kuantitatif, yaitu estimasi model regresi dengan penggunaan data panel. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akan digunakan model ekonometrika.

Menurut Samuelson, dalam Damodar Gujarati ekonometrika didefinisikan sebagai analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi yang sebenarnya (aktual) yang didasarkan pada pengembangan yang bersamaan dari teori dan pengamatan, dihubungkan dengan metode inferensi yang sesuai. Ekonometrika merupakan campuran dari teori ekonomi, ekonomi matematis, statistika ekonomi, dan statistika matematis.

Simon Kuznet (1955) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang akan diawali dengan tingkat ketidakmerataan yang tinggi, sampai pada tingkat waktu tertentu dimana laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat maka akan di ikuti dengan tingkat ketidakmerataan yang semakin rendah (*inverted U curve hypothesis*). Dengan dasar teori tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan, maka untuk menganalisis skripsi ini, digunakan analisis regresi persamaan simultan (*simultaneous equation regresion model*) dengan model Berulang (*Recursive Models*) dan Kuadrat Terkeci. Model akan diregresi menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan data panel, atau disebut PLS (*Panel Least Square*). Dalam skripsi ini digunakan *software* Eviews 6.1 untuk pengolahan data, uji asumsi klasik dan uji statistik.

3.4.1 *Simultaneous Equation Regression Model*

Model regresi persamaan simultan, merupakan sebuah model persamaan regresi yang melihat hubungan *bilateral*, atau umpan balik antara variabel dependen (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*) (Gujarati, 2007).

Dalam sebuah model regresi, dapat dilihat dimana ada hubungan korelasai antara variabel dependen dan variabel bebas, dimana variabel bebas mempengaruhi variabel dependen. Tetapi hubungan *linear* satu arah seperti itu tidak selamanya dapat dipertahankan. Sangat mungkin bahwa variabel bebas tidak hanya mempengaruhi variabel dependen, tetapi variabel dependen juga dapat mempengaruhi satu atau lebih dari variabel bebas. Dengan demikian maka dapat disimpulkan di dalam model tersebut terdapat hubungan *bilateral* atau umpan balik antara variabel dependen dan variabel bebas.

Model-model regresi dimana ada lebih dari satu persamaan dan dimana ada hubungan umpan balik diantara variabel dikenal sebagai model regresi persamaan simultan (*simultaneous equation regression models*).

3.4.1.1 Model Berulang (*Recursive Models*) dan Kuadrat Terkecil

Model berulang (*recursive models*) dan kuadrat terkecil adalah salah satu model regresi dengan model regresi persamaan simultan (*simultaneous equation regression models*).

Seperti sifat dari model regresi persamaan simultan, *recursive models* juga terdapat dua model atau lebih yang saling berkorelasi, atau memiliki hubungan linier antara variabel *dependent* dan *independent*-nya.

Untuk persamaan di dalam *recursive model* merupakan kasus dimana OLS dapat diterapkan secara benar walaupun dalam persamaan simultan. Dimana antara persamaan yang satu akan mempengaruhi persamaan berikutnya. Untuk

melihat sifat dari model ini, perhatikan tiga-persamaan berikut ini (Gujarati, 1997):

$$Y = \beta_{10} + \gamma_{11}X_{1t} + \gamma_{12}X_{2t} + \mu_{1t} \dots\dots (3.4.1)$$

$$Y = \beta_{20} + \beta_{21}Y_{1t} + \gamma_{21}X_{1t} + \gamma_{22}X_{2t} + \mu_{2t} \dots\dots(3.4.2)$$

$$Y = \beta_{30} + \beta_{31}Y_{1t} + \beta_{32}Y_{2t} + \gamma_{31}X_{1t} + \gamma_{32}X_{2t} + \mu_{3t} \dots\dots(3.4.3)$$

Dimana Y dan X secara berturut-turut adalah variabel endogen variabel endogen dan eksogen, unsure gangguan sedemikian rupa sehingga

$$E(\mu_{1t}, \mu_{2t}) = E(\mu_{1t}, \mu_{3t}) = E(\mu_{2t}, \mu_{3t}) = 0 \quad (10)$$

Dimana artinya adalah gangguan pada periode yang sama dalam persamaan yang berbeda tidak berkorelasi (secara teknis, ini merupakan asumsi korelasi kontemporer nol).

Jika kita perhatikan persamaan (3.4.1), persamaan tadi berisi hanya variabel eksogen pada sisi sebelah kanan dan karena dengan asumsi variabel tadi tidak berkorelasi dengan variabel gangguan μ_1 , persamaan ini memenuhi asumsi kritis dari OLS klasik, yaitu variabel tidak berkorelasi dengan gangguan stokastik. Jadi OLS dapat diterapkan untuk persamaan ini. Kemudian untuk persamaan kedua yang berisi variabel endogen Y_1 sebagai variabel yang menjelaskan bersama-sama dengan X yang nonstokastik. Sekarang OLS juga dapat diterapkan dalam persamaan ini karena Y_{1t} dan μ_{2t} tak berkorelasi, sebab μ_1 yang mempengaruhi Y_1 sesuai dengan asumsi tak berkorelasi dengan μ_2 . Oleh karena itu, untuk semua maksud praktis, Y_1 adalah variabel yang ditetapkan lebih dahulu

selama berkenaan dengan Y_2 . Jadi orang dapat melangkah maju dengan penaksiran OLS dari persamaan ini. Dengan membawa argumen ini selangkah lebih jauh, OLS dapat juga diterapkan pada persamaan ketiga dalam persamaan di atas, karena baik Y_1 dan Y_2 , kedua-duanya tak berkorelasi dengan μ_3 .

3.4.2 Estimasi Model Regresi

Model yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah model yang pernah digunakan oleh Gary M. Woller dan Kerk Phillips (1998), Jin dan Zou (2000), dan Jaime Bonet (2006). Dengan mengacu pada teori Simon Kuznet (1955) dan model berulang (*recursive models*) dan kuadrat terkecil, maka model yang dibentuk adalah:

$$\text{Model Pertumbuhan Ekonomi: } PE = f(DF, PD, TK, AG) \quad (11)$$

$$\text{Model Ketimpangan Wilayah: } KW = f(PE, DF, PD, TK, AG) \quad (12)$$

Dimana:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

KW = Ketimpangan Wilayah

DF = Desentralisasi Fiskal

PD = Pajak Daerah

TK = Tenaga Kerja

Ag = Aglomerasi

Model dasar (11) dan (12) kemudian diturunkan menjadi model ekonometrika sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 Ag_{it} + \mu_{it} \quad (13)$$

$$KW_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PE_{it} + \alpha_2 DF_{it} + \alpha_3 PD_{it} + \alpha_4 TK_{it} + \alpha_5 Ag_{it} + \mu_{it} \quad (14)$$

Dimana dalam persamaan ekonometrika linier di atas i menunjukkan unit *cross section* dan t menunjukkan periode waktu. Model ini terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- PE = Pertumbuhan Ekonomi akan diukur melalui logaritma natural PDRB per kapita kabupaten/kota atas dasar harga konstan
- KW = Ketimpangan antar wilayah akan diukur melalui proksi seesuai yang digunakan oleh Jaime Bonet (2006) dalam penelitiannya, dengan konsep PDRB per kapita relatif.
- DF = Desentralisasi Fiskal, sejalan dengan penelitian Gary M. Woller dan Kerk Phillips (1998) derajat DF akan diukur menggunakan pendekatan penerimaan, yaitu dengan mengukur derajat DF dar *share* Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).
- TK = Tenaga Kerja akan diukur jumlah angkatan kerja yaitu jumlah tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi yang merupakan hasil laporan kantor BPS (untuk penelitian ini digunakan data angkatan kerja yang bersumber dari Kantor BPS Jawa Barat)
- PD = Pajak Daerah diukur dengan rasio total pajak daerah masing-masing kabupaten kota sebagai persentase terhadap total PDRB

kabupaten/kota tersebut. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian Jin dan Zou (2000)

- A_g = Aglomerasi, diproksi dari *share* PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Propinsi Jawa Barat (Bonet, 2006).
- μ_{it} = Gangguan Stokastik

3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik

Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) merupakan model yang berusaha untuk meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi aktual. Dibandingkan dengan metode lain, *Ordinary Least Squares* merupakan metode sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan regresi linear terhadap sebuah model. Sebagai estimator, *Ordinary Least Squares* merupakan metode regresi dengan keunggulan sebagai estimator linear terbaik yang tidak bias. BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga hasil perhitungan *Ordinary Least Squares* dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Namun untuk menjadi sebuah estimator yang baik dan tidak bias, terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi.

Gujarati (1995) menyebutkan bahwa kesepuluh asumsi yang harus dipenuhi. *Pertama*, model persamaan berupa linear. *Kedua*, nilai variabel independen tetap meskipun dalam pengambilan sampel yang berulang. *Ketiga* nilai rata-rata penyimpangan sama dengan nol. *Keempat*, *homocedasticity*. *Kelima* tidak ada autokorelasi antara variabel. *Keenam*, nilai *covariance* sama dengan nol. *Ketujuh*, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah parameter yang

diestimasi. *Kedelapan*, nilai variabel independen yang bervariasi. *Kesembilan*, model regresi harus memiliki bentuk yang jelas. *Kesepuluh* adalah tidak adanya *multicolinearity* antar variabel independen. Terpenuhinya kesepuluh asumsi di atas menjadikan hasil regresi memiliki derajat kepercayaan yang tinggi.

3.4.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji, apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent variable). Uji multikolinieritas terjadi hanya pada regresi ganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi diantara variabel bebas. Bila terjadi hubungan linear yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi maka dikatakan terdapat masalah multikolinieritas dalam model tersebut. Masalah multikolinieritas mengakibatkan adanya kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi parsial (*examination of partial correlation*). Metode ini dimunculkan oleh Farrar dan Glaubel, metodenya adalah dengan melihat nilai R^2 dari model utama yang diestimasi dan nilai R^2 dari regresi antar variabel bebasnya. Bila R^2 model utama lebih tinggi dibandingkan R^2 dari regresi antar variabel-variabel bebasnya, dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

3.4.3.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu atau ruang. Salah satu cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (D-W test).

Hipotesanya adalah :

H_0 : Tidak ada autokorelasi positif

H_0^* : Tidak ada autokorelasi negatif

Kriteria Pengujiannya adalah sebagai berikut.

1. Bila nilai D-W statistik terletak antara $0 < d < dl$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ditolak.
2. Bila nilai D-W statistik terletak antara $4 - dl < d < 4$, H_0^* yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif ditolak.
3. Bila nilai D-W statistik terletak antara $du < d < 4 - du$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H_0^* yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima.
4. Ragu – ragu tidak ada autokorelasi positif bila $dl \leq d \leq du$.
5. Ragu – ragu tidak ada autokorelasi negatif bila $du \leq d \leq 4 - dl$

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila *error* atau residual model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah estimator

yang diperoleh tidak efisien. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Park. Park menyarankan suatu bentuk fungsi spesifik di antara σ^2_i dan variabel bebas untuk menyelidiki ada – tidaknya masalah heteroskedastisitas. Bentuk fungsi yang disarankan oleh Park adalah :

$$\sigma^2_i = \sigma^2 X_i^\beta e^{v_i} \quad (14)$$

atau bila ditulis dalam bentuk logaritma natural adalah sebagai berikut:

$$\ln \sigma^2_i = \ln \sigma^2 + \beta \ln X_i + v_i \quad (15)$$

karena nilai σ^2_i tidak dapat diamati, maka nilai σ^2_i dapat digantikan dengan u^2_i (residual), sehingga persamaan (15) ditulis menjadi:

$$\begin{aligned} \ln u^2_i &= \ln u^2 + \beta \ln X_i + v_i \\ &= \alpha + \beta \ln X_i + v_i \end{aligned} \quad (16)$$

Hipotesanya adalah:

H_0 : Data dari model empiris tidak terdapat heterokedastisitas atau asumsi homokedastisitas terpenuhi

H_a : Data dari model empiris terdapat heterokedastisitas atau asumsi homokedastisitas tidak terpenuhi

Kriteria pengujiannya adalah apabila koefisien parameter β dari persamaan (16) signifikan secara statistik, hal ini berarti data dari model empiris yang diestimasi terdapat heterokedastisitas atau H_0 ditolak dan H_a diterima, dan sebaliknya apabila koefisien parameter β dari persamaan (16) tidak signifikan secara statistik, maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau asumsi homokedastisitas diterima yang artinya tidak terdapat heterokedastisitas.

3.4.3.4 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan *Jarque-Bera test (J-B test)* untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan hasil residual dan *chi-square probability distribution*, hipotesis yang akan diuji adalah :

H_0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H_a : Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian adalah:

1. Bila nilai JB hitung $>$ nilai X^2 tabel, maka H_0 yang menyatakan residual, u_i adalah berdistribusi normal ditolak.
2. Bila nilai JB hitung $<$ nilai X^2 tabel, maka H_0 yang menyatakan residual, u_i adalah berdistribusi normal diterima.

3.4.4 Pengujian Statistik Analisis Regresi

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), pengujian koefisien regresi secara serentak (uji F), dan pengujian pengujian koefisien regresi secara individual (uji t).

3.4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam suatu penelitian atau observasi, perlu dilihat seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan dependen variabelnya. Dalam analisis regresi diperlukan suatu ukuran yang dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut, yang dikenal dengan koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi mengukur variasi turunan Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Bila nilai koefisien determinasi yang diberi simbol R^2 mendekati angka 1, maka variabel independen makin mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh model tersebut dapat di benarkan (Gujarati, 1997).

Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

1. Sebagai ukuran ketepatan / kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil R^2 , maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
2. Untuk mengukur proporsi / presentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel X terhadap variabel U untuk mengukur proporsi / presentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel X terhadap variabel Y.

3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k \neq 0 \quad (17)$$

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$

$$H_1 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k \neq 0 \quad (18)$$

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah:

- Terima H_0 jika F statistik < nilai F tabel, artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.
- Terima H_1 jika nilai F statistik > nilai F tabel, artinya nilai suatu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

3.4.4.3 Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_0 = 0, \text{ tidak berpengaruh}$$

$$H_1 : \beta_1 > 0, \beta_2 > 0, \beta_3 > 0, \beta_4 > 0, \text{ berpengaruh dan Positif}$$

$$H_1 : \beta_1 < 0, \beta_2 < 0, \beta_3 < 0, \beta_4 < 0, \text{ berpengaruh dan negatif} \quad (19)$$

$$H_0 : \alpha_0 = 0, \text{ tidak berpengaruh}$$

$$H_1 : \alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0, \alpha_3 > 0, \alpha_4 > 0, \alpha_5 > 0 \text{ berpengaruh dan Positif}$$

$$H_1 : \alpha_1 < 0, \alpha_2 < 0, \alpha_3 < 0, \alpha_4 < 0, \alpha_5 < 0 \text{ berpengaruh dan negatif} \quad (20)$$

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah:

- Terima H_0 jika t statistik < nilai t tabel, artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.
- Terima H_1 jika nilai t statistik > nilai t tabel, artinya nilai suatu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

Menurut Imam Ghozali (2005), cara melakukan uji t adalah sebagai berikut

1. Bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5 persen, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Propinsi Jawa Barat

Propinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya; sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, sebelah timur, berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat, berbatasan dengan Propinsi Banten. Propinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 34.816 km² dengan kepadatan penduduk 1192 jiwa/km² (BPS).

Secara administratif, Propinsi Jawa Barat terdiri atas 16 Kabupaten (Kab.Bogor, Kab.Sukabumi, Kab.Cianjur, Kab.Bandung, Kab.Garut, Kab.Tasikmalaya, Kab.Ciamis, Kab.Kuningan, Kab.Cirebon, Kab.Majalengka, Kab.Sumdang, Kab.Indramayu, Kab.Subang, Kab.Purwakarta, Kab.Karawang, Kab.Bekasi) dan 9 Kota (Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, Banjar).

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat

Kondisi makro ekonomi 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat dalam penelitian ini di jelaskan oleh kondisi PDRB per kapita 25 kabupaten di Propinsi Jawa Barat, seperti ditunjukkan oleh tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat
Tahun 2004-2008
(persen)

N0	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Kab. Bogor	8.70	8.72	8.75	8.78	8.82	8.75
2	Kab. Sukabumi	8.04	8.07	8.10	8.14	8.17	8.10
3	Kab. Cianjur	8.06	8.09	8.11	8.14	8.17	8.11
4	Kab. Bandung	8.59	8.58	5.99	8.72	8.75	8.13
5	Kab. Garut	8.22	8.24	8.25	8.28	8.30	8.26
6	Kab. Tasikmalaya	7.89	7.85	7.86	7.87	7.89	7.87
7	Kab. Ciamis	8.22	8.25	8.27	8.31	8.34	8.28
8	Kab. Kuningan	7.96	7.98	8.00	8.02	8.04	8.00
9	Kab Cirebon	7.97	8.01	8.05	8.09	8.12	8.05
10	Kab. Majalengka	7.96	8.00	8.03	8.07	8.11	8.03
11	Kab. Sumedang	8.33	8.35	8.37	8.39	8.42	8.37
12	Kab. Indramayu	8.94	8.85	8.87	8.88	8.90	8.89
13	Kab. Subang	8.30	8.35	8.36	8.40	8.43	8.37
14	Kab. Purwakarta	8.90	8.92	8.94	8.96	8.99	8.94
15	Kab. Karawang	8.84	8.89	8.94	8.98	9.03	8.94
16	Kab. Bekasi	9.92	9.96	10.00	10.04	10.08	10.00
17	Kota Bogor	8.30	8.35	8.39	8.44	8.49	8.39
18	Kota Sukabumi	8.48	8.50	8.54	8.58	8.63	8.55
19	Kota Bandung	9.07	9.13	9.19	9.26	9.33	9.20
20	Kota Cirebon	9.74	9.77	9.81	9.85	9.88	9.81
21	Kota Bekasi	8.66	8.68	8.72	8.76	8.79	8.72
22	Kota Depok	8.10	8.15	8.20	8.25	8.30	8.20
23	Kota Cimahi	9.22	9.25	9.27	9.29	9.31	9.27
24	Kota Tasikmalaya	8.50	8.51	8.53	8.57	8.60	8.54
25	Kota Banjar	8.12	8.13	8.15	8.18	8.21	8.16
Standar Deviasi (SD)		0.43	0.43	0.43	0.51	0.43	-

Sumber: Lampiran B

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat tiap tahunnya cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota mengindikasikan adanya proses pembangunan ekonomi daerah berada pada keadaan yang cukup baik. Dari tabel 4.1 juga dapat dideskripsikan

bahwa kondisi makroekonomi di Propinsi Jawa Barat dalam keadaan yang baik dapat dilihat dari standar deviasi setiap tahunnya, yaitu menurun dari 0,43 pada tahun 2004-2006, kemudian meningkat dari 0,43-0,51 pada tahun 2006-2007, kemudian kembali menurun dari 0,51-0,43 pada tahun 2007-2008 yang menunjukkan adanya kestabilan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

Secara umum pertumbuhan ekonomi 25 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat menunjukkan dampak yang positif dan signifikan. Adapun wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Bekasi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 10,00 persen per tahun, yang kedua adalah Kota Cirebon dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 9,81 persen per tahun, dan yang ketiga adalah Kota Cimahi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 9,27 persen per tahun. Sedangkan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan rata-rata PDRB per kapita sebesar 7,87 persen per tahun.

Perbedaan pengelolaan dan pengembangan antar sektoral di masing-masing Kabupaten/Kota menjadi salah satu alasan yang menimbulkan perbedaan tingkat PDRB per kapita yang terjadi antar wilayah di Propinsi Jawa Barat.

4.1.3 Desentralisasi Fiskal di Propinsi Jawa Barat

Desentralisasi fiskal di Propinsi Jawa Barat, merupakan representasi dari visi pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita menciptakan Propinsi Jawa Barat memiliki pemerintah yang baik dan cakap (*good governance*)

sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal bagi masyarakat Jawa Barat (<http://www.pemprov.jabar.go.id>). Perkembangan desentralisasi fiskal dilihat dari rasio Penerimaan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.2 sebagai representasi kemandirian daerah.

Tabel 4.2
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota
di Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008
(dalam persen)

N0	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Kab. Bogor	10.32	10.06	12.07	11.48	12.99	11.38
2	Kab. Sukabumi	5.04	5.97	5.98	6.11	7.15	6.05
3	Kab. Cianjur	6.85	8.46	7.73	6.50	6.50	7.21
4	Kab. Bandung	9.83	9.02	8.62	8.71	8.70	8.97
5	Kab. Garut	6.38	7.17	6.00	6.56	6.12	6.45
6	Kab. Tasikmalaya	4.28	4.16	8.25	3.63	4.72	5.01
7	Kab. Ciamis	5.88	3.44	3.52	5.20	4.03	4.41
8	Kab. Kuningan	5.95	7.04	5.60	5.67	5.08	5.87
9	Kab Cirebon	8.29	8.56	9.94	9.93	9.10	9.16
10	Kab. Majalengka	5.84	6.81	7.14	5.02	5.22	6.01
11	Kab. Sumedang	10.80	11.92	10.35	8.79	9.84	10.34
12	Kab. Indramayu	7.00	6.50	6.03	4.93	5.48	5.99
13	Kab. Subang	7.87	6.95	6.98	7.05	7.13	7.19
14	Kab. Purwakarta	10.79	11.43	10.32	8.92	9.38	10.17
15	Kab. Karawang	11.27	11.18	11.40	11.23	11.74	11.37
16	Kab. Bekasi	12.76	17.43	19.17	17.43	17.81	16.92
17	Kota Bogor	12.92	17.73	12.73	12.60	13.62	13.92
18	Kota Sukabumi	13.96	11.79	12.69	11.20	14.58	12.84
19	Kota Bandung	19.92	14.94	16.11	17.04	15.58	16.72
20	Kota Cirebon	14.86	11.14	13.46	11.30	12.19	12.59
21	Kota Bekasi	15.37	17.21	16.31	15.41	14.98	15.86
22	Kota Depok	11.71	12.53	11.22	11.25	13.51	12.04
23	Kota Cimahi	14.70	17.15	12.85	12.52	12.95	14.04
24	Kota Tasikmalaya	10.35	8.98	10.77	10.56	9.91	10.11
25	Kota Banjar	4.89	9.76	7.04	6.05	7.40	7.03
Standar Deviasi		3.27	3.30	3.06	3.13	3.34	-

Sumber : Lampiran B $\left[DF = \frac{PAD}{TPD} \times 100 \% \right]$

Dari Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa derajat desentralisasi fiskal (DF) yang dapat dicapai oleh seluruh Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2004-2005, Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dalam pencapaian desentralisasi fiskal (DF) (dapat dilihat dari standar deviasi tahun 2004-2005, yaitu 3.27 menjadi 3.30), tetapi pada tahun 2005-2006 derajat desentralisasi fiskal (DF) yang dicapai mengalami penurunan setiap tahunnya (dapat dilihat dari standar deviasi yang bergerak dari 3.30-3.06), tetapi pada tahun 2006-2008 derajat desentralisasi fiskal (DF) kembali mengalami peningkatan (dapat dilihat dari standar deviasi tahun 2006-2008 dari 3.06 - 3.13 - 3.34). Data tersebut medeskripsikan bahwa pemerintah daerah belum stabil dan konsisten dalam menciptakan kemandirian bagi daerahnya masing-masing.

Pada Tabel 4.2 juga dideskripsikan bahwa daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal (DF) tertinggi adalah Kabupaten Bekasi dengan rata-rata DF sebesar 16,92 persen, yang kedua adalah Kota Bandung dengan rata-rata DF sebesar 16,72 persen dan yang ketiga adalah Kota Bekasi dengan rata-rata DF sebesar 15,86 persen. Sedangkan daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal terendah adalah Kabupaten Ciamis dengan rata-rata DF sebesar 4,41 persen.

4.1.4 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu instrument dalam penerapan desentralisasi fiskal, karena merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah. Pajak daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah rasio dari total pajak daerah terhadap PDRB, sebagai suatu tolak ukur untuk melihat sejauh mana pajak

daerah mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Persentase pajak daerah dijelaskan seperti pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB per Kabupaten/Kota
di Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008

N0	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Kab. Bogor	0.3857	0.4265	0.4521	0.5010	0.5344	0.4600
2	Kab. Sukabumi	0.1222	0.1233	0.1330	0.1456	0.1742	0.1396
3	Kab. Cianjur	0.1570	0.1977	0.2225	0.2389	0.2499	0.2132
4	Kab. Bandung	0.2199	0.2014	0.3250	0.3357	0.2621	0.2688
5	Kab. Garut	0.0586	0.0725	0.0709	0.0818	0.0785	0.0725
6	Kab. Tasikmalaya	0.0957	0.0984	0.9467	0.1099	0.2081	0.2918
7	Kab. Ciamis	0.0884	0.0860	0.0820	0.0853	0.1021	0.0888
8	Kab. Kuningan	0.1822	0.1944	0.1848	0.2189	0.2280	0.2017
9	Kab Cirebon	0.2833	0.3251	0.3571	0.3697	0.4078	0.3486
10	Kab. Majalengka	0.0850	0.1031	0.1098	0.1055	0.1194	0.1046
11	Kab. Sumedang	0.3826	0.4035	0.3877	0.4548	0.4928	0.4243
12	Kab. Indramayu	0.0709	0.0840	0.0975	0.0988	0.1378	0.0978
13	Kab. Subang	0.1976	0.2059	0.1995	0.2631	0.2646	0.2261
14	Kab. Purwakarta	0.3218	0.3143	0.3754	0.3160	0.3192	0.3293
15	Kab. Karawang	0.5176	0.2333	0.3024	0.3213	0.3335	0.3416
16	Kab. Bekasi	0.1596	0.1660	0.1688	0.1971	0.2140	0.1811
17	Kota Bogor	0.6237	0.7439	0.7202	0.9346	1.0813	0.8207
18	Kota Sukabumi	0.2454	0.2665	0.2893	0.3001	0.3751	0.2953
19	Kota Bandung	0.6720	0.6696	0.7151	0.7638	0.7947	0.7230
20	Kota Cirebon	0.2121	0.2412	0.2592	0.2797	0.2959	0.2576
21	Kota Bekasi	0.3892	0.4035	0.5278	0.3988	0.5606	0.4560
22	Kota Depok	0.4851	0.6222	0.7577	0.7825	0.8397	0.6974
23	Kota Cimahi	0.2936	0.2639	0.2470	0.2513	0.2695	0.2651
24	Kota Tasikmalaya	0.1429	0.1579	0.1670	0.1869	0.2471	0.1804
25	Kota Banjar	0.1220	0.1576	0.1631	0.1516	0.2448	0.1678
Standar Deviasi		0.139911	0.1399	0.1396	0.1813	0.1617	0.1807

Sumber : Lampiran B $\left[PD = \frac{\text{Total Pajak Daerah Masing-masing Kabupaten/Kota}}{\text{Total PDRB Kabupaten/Kota}} \right]$

Dari Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa rasio pajak daerah (PD) yang dapat dicapai oleh seluruh Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2004-2006, Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan

dalam pencapaian rasio pajak daerah (PD) (dapat dilihat dari standar deviasi tahun 2004-2006, yaitu 0,139 - 0,139 - 0,181), tetapi pada tahun 2007 rasio pajak daerah (PD) yang dicapai mengalami penurunan (dapat dilihat dari standar deviasi dari 0,181 – 0,161), tetapi pada tahun 2008 derajat rasio pajak daerah (PD) kembali mengalami peningkatan (dapat dilihat dari standar deviasi tahun 2008 dari 0,161 – 0,180). Data tersebut medeskripsikan bahwa pemerintah daerah cukup stabil dan konsisten dalam mengalokasikan penerimaan asli daerahnya untuk menumbuhkan produk domestik regional bruto (PDRB) di daerahnya masing-masing.

Pada Tabel 4.3 juga dideskripsikan bahwa daerah yang memiliki rasio pajak daerah (PD) tertinggi adalah Kota Bogor dengan rata-rata PD sebesar 0,82 persen, yang kedua adalah Kota Bandung dengan rata-rata PD sebesar 0,72 persen dan yang ketiga adalah Kota Depok dengan rata-rata PD sebesar 0,70 persen. Sedangkan daerah yang memiliki rasio pajak daerah (PD) terendah adalah Kabupaten Garut dengan rata-rata PD sebesar 0,07 persen.

4.1.5 Tenaga Kerja

Tenaga kerja (TK) merupakan salah satu instrument penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja (TK) merupakan salah satu input dalam mendorong produktifitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tenaga kerja (TK) dalam penelitian ini merupakan bagian dari angkatan kerja yang aktif bekerja. Data tentang tenaga kerja (TK) di 25 kabupaten/kota pada Propinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Jumlah Tenaga Kerja per Kabupaten/Kota
di Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008

N0	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Kab. Bogor	1340253	1399531	1453567	1455910	1470487	1423949.6
2	Kab. Sukabumi	823478	831625	887261	897200	900258	867964.4
3	Kab. Cianjur	805245	821876	855530	860828	876044	843904.6
4	Kab. Bandung	1481516	1463108	1542607	1544241	1582854	1522865.2
5	Kab. Garut	816476	849415	862163	884859	886044	859791.4
6	Kab. Tasikmalaya	736416	715583	720904	808334	863367	768920.8
7	Kab. Ciamis	714612	721554	727902	784173	797136	749075.4
8	Kab. Kuningan	434484	435762	513934	524770	525539	486897.8
9	Kab Cirebon	804608	826834	828446	843498	844856	829648.4
10	Kab. Majalengka	495728	504676	527927	576147	576818	536259.2
11	Kab. Sumedang	414520	419145	468113	507674	514095	464709.4
12	Kab. Indramayu	766150	705442	710300	720973	741242	728821.4
13	Kab. Subang	568643	571525	588167	647108	649879	605064.4
14	Kab. Purwakarta	281010	284400	287061	320090	321647	298841.6
15	Kab. Karawang	624351	650133	714152	732948	854404	715197.6
16	Kab. Bekasi	696764	720896	742586	734633	741311	727238.0
17	Kota Bogor	264216	272459	289731	308277	377388	302414.2
18	Kota Sukabumi	84378	89816	94518	109367	118349	99285.6
19	Kota Bandung	869022	878590	915020	915147	952752	906106.2
20	Kota Cirebon	105984	106786	108077	113531	127531	112381.8
21	Kota Bekasi	656493	696384	722304	768520	901041	748948.4
22	Kota Depok	512775	517860	520608	570303	657050	555719.2
23	Kota Cimahi	162174	170130	179125	207748	219634	187762.2
24	Kota Tasikmalaya	223872	224034	245346	245757	254054	238612.6
25	Kota Banjar	58718	59238	61190	62886	66417	61689.8
Standar Deviasi (juta)		277568.5	281106.7	287051.3	284577.3	293223.5	-

Sumber : Lampiran B

Dari Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga kerja (TK) yang dapat di serap di masing-masing Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2004-2006, Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja (TK) (dapat dilihat dari standar deviasi tahun 2004-2006, yaitu 277568,3 – 281106,7 – 287051,3), tetapi pada

tahun 2007 jumlah tenaga kerja (TK) mengalami penurunan (dapat dilihat dari standar deviasi dari 287051,3 – 284577,3), tetapi pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja (TK) kembali mengalami peningkatan (dapat dilihat dari standar deviasi tahun 2008 dari 284577,3 – 293223,5). Data tersebut mendeskripsikan bahwa pertumbuhan tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota cukup stabil.

Pada Tabel 4.4 juga dideskripsikan bahwa daerah yang memiliki jumlah tenaga kerja (TK) tertinggi adalah Kabupaten Bandung dengan rata-rata jumlah TK sebesar 1522865.20, yang kedua adalah Kabupaten Bogor dengan rata-rata jumlah TK sebesar 1423949.60, dan yang ketiga adalah Kota Bandung dengan rata-rata jumlah tenaga kerja sebesar 906106.20. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah tenaga kerja (TK) terendah adalah Kota Banjar dengan rata-rata jumlah tenaga kerja sebesar 61689.80.

4.1.6 Aglomerasi

Aglomerasi adalah salah satu indikator pertumbuhan suatu daerah atau wilayah, karena aglomerasi mendeskripsikan proses pertumbuhan suatu daerah atau wilayah menjadi lebih maju (pengkotaan). Data tentang tingkat aglomerasi dari 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Tingkat Aglomerasi per Kabupaten/Kota
di Propinsi Jawa Barat Tahun 2004 – 2008

N0	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Kab. Bogor	0.1016	0.1031	0.1031	0.1027	0.1024	0.1026
2	Kab. Sukabumi	0.0293	0.0293	0.0288	0.0281	0.0276	0.0286
3	Kab. Cianjur	0.0282	0.0281	0.0274	0.0268	0.0263	0.0273
4	Kab. Bandung	0.0926	0.0937	0.0685	0.0681	0.0678	0.0782
5	Kab. Garut	0.0361	0.0361	0.0355	0.0349	0.0345	0.0354
6	Kab. Tasikmalaya	0.0179	0.0179	0.0175	0.0172	0.0169	0.0175
7	Kab. Ciamis	0.0242	0.0242	0.0238	0.0234	0.0232	0.0238
8	Kab. Kuningan	0.0132	0.0132	0.0129	0.0127	0.0125	0.0129
9	Kab Cirebon	0.0259	0.0261	0.0259	0.0258	0.0254	0.0258
10	Kab. Majalengka	0.0145	0.0146	0.0143	0.0141	0.0139	0.0143
11	Kab. Sumedang	0.0185	0.0185	0.0182	0.0179	0.0177	0.0182
12	Kab. Indramayu	0.0574	0.0507	0.0490	0.0473	0.0459	0.0501
13	Kab. Subang	0.0242	0.0248	0.0240	0.0236	0.0234	0.0240
14	Kab. Purwakarta	0.0238	0.0236	0.0232	0.0226	0.0224	0.0231
15	Kab. Karawang	0.0576	0.0596	0.0605	0.0603	0.0605	0.0597
16	Kab. Bekasi	0.1672	0.1701	0.1856	0.1695	0.1699	0.1725
17	Kota Bogor	0.0144	0.0147	0.0147	0.0146	0.0147	0.0146
18	Kota Sukabumi	0.0058	0.0058	0.0059	0.0059	0.0059	0.0058
19	Kota Bandung	0.0853	0.0880	0.0895	0.0910	0.0930	0.0893
20	Kota Cirebon	0.0201	0.0203	0.0202	0.0201	0.0201	0.0201
21	Kota Bekasi	0.0477	0.0483	0.0484	0.0483	0.0484	0.0482
22	Kota Depok	0.0191	0.0196	0.0197	0.0198	0.0199	0.0196
23	Kota Cimahi	0.0210	0.0211	0.0209	0.0206	0.0204	0.0208
24	Kota Tasikmalaya	0.0122	0.0121	0.0120	0.0120	0.0120	0.0121
25	Kota Banjar	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0023	0.0024
Standar Deviasi		0.0272	0.0272	0.0274	0.0270	0.0262	0.0263

Sumber : Lampiran B $\left[Ag = \frac{PDRB \text{ Kabupaten/Kota}}{PDRB \text{ Propinsi Jawa Barat}} \right]$

Dari Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa tingkat aglomerasi (Ag) yang dapat dicapai di masing-masing Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2004-2006, Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan aglomerasi (Ag) (dapat dilihat dari standar deviasi tahun 2004-2005, yaitu $0,0272396 - 0,0274488$) tetapi pada tahun 2005-2007 tingkat aglomerasi (Ag) mengalami penurunan (dapat dilihat dari standar deviasi dari $0,0274488 - 0,0270471 - 0,0261536$), tetapi pada tahun 2007-2008 tingkat aglomerasi (Ag) kembali mengalami peningkatan (dapat dilihat dari standar deviasi tahun 2008 dari $0,0261536 - 0,0262703$). Data tersebut mendeskripsikan bahwa tingkat aglomerasi di masing-masing kabupaten/kota cukup stabil dan konsisten walaupun ada fluktuasi di tahun tertentu.

Pada Tabel 4.4 juga dideskripsikan bahwa daerah yang memiliki tingkat aglomerasi (Ag) tertinggi adalah Kabupaten Bekasi dengan rata-rata jumlah Ag sebesar 0.172472, yang kedua adalah Kabupaten Bogor dengan rata-rata tingkat aglomerasi (Ag) sebesar 0.102579, dan yang ketiga adalah Kota Bandung dengan rata-rata tingkat aglomerasi (Ag) sebesar 0.089336. Sedangkan daerah yang memiliki tingkat aglomerasi (Ag) terendah adalah Kota Banjar dengan rata-rata tingkat aglomerasi (Ag) sebesar 0.002383.

4.1.7 Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan perbedaan (*gap*) antar daerah dalam satu wilayah. Ketimpangan wilayah dapat diukur dari berbagai sektor. Dalam penelitian ini ketimpangan wilayah diukur berdasarkan pendapatan (PDRB)

Tabel 4.6
Tingkat Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota
di Propinsi Jawa Barat
Tahun 2004 – 2008

N0	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Kab. Bogor	0.5806	0.6036	0.6840	0.6530	0.6821	0.6406
2	Kab. Sukabumi	0.1861	0.1594	0.1162	0.1341	0.1231	0.1438
3	Kab. Cianjur	0.1676	0.1470	0.1129	0.1341	0.1229	0.1369
4	Kab. Bandung	0.4202	0.4018	0.0725	0.5587	0.5730	0.4052
5	Kab. Garut	0.0189	0.0085	0.0278	0.0023	0.0051	0.0125
6	Kab. Tasikmalaya	0.2986	0.3278	0.3079	0.3343	0.3370	0.3211
7	Kab. Ciamis	0.0257	0.0021	0.0452	0.0262	0.0455	0.0289
8	Kab. Kuningan	0.2456	0.2348	0.2039	0.2291	0.2249	0.2276
9	Kab. Cirebon	0.2369	0.2101	0.1643	0.1712	0.1623	0.1890
10	Kab. Majalengka	0.2469	0.2207	0.1771	0.1865	0.1683	0.1999
11	Kab. Sumedang	0.0885	0.1080	0.1519	0.1192	0.1283	0.1192
12	Kab. Indramayu	1.0135	0.8374	0.8982	0.8289	0.8322	0.8820
13	Kab. Subang	0.0549	0.1122	0.1458	0.1244	0.1441	0.1163
14	Kab. Purwakarta	0.9223	0.9555	1.0326	0.9675	1.0011	0.9758
15	Kab. Karawang	0.8233	0.9140	1.0500	1.0200	1.0701	0.9755
16	Kab. Bekasi	4.3558	4.5517	5.4196	4.7974	4.9161	4.8081
17	Kota Bogor	0.0623	0.1082	0.1819	0.1744	0.2091	0.1472
18	Kota Sukabumi	0.2689	0.2961	0.3698	0.3545	0.3890	0.3357
19	Kota Bandung	1.2860	1.4220	1.6335	1.6737	1.8121	1.5654
20	Kota Cirebon	3.4620	3.5939	3.8664	3.8106	3.8527	3.7171
21	Kota Bekasi	0.5154	0.5446	0.6325	0.6113	0.6436	0.5895
22	Kota Depok	0.1354	0.0926	0.0277	0.0280	0.0048	0.0577
23	Kota Cimahi	1.6729	1.7229	1.8366	1.7538	1.7661	1.7505
24	Kota Tasikmalaya	0.2887	0.3018	0.3574	0.3324	0.3569	0.3274
25	Kota Banjar	0.1127	0.1109	0.0698	0.0942	0.0862	0.0948
Standar Deviasi		0.691088	0.6911	0.7169	0.8202	0.7599	0.7797

Sumber : Lampiran B $\left[KW = \frac{PDRBC \text{ kabupaten/kota}}{PDRBC \text{ Propinsi Jawa Barat}} - 1 \right]$

Dari Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa tingkat Ketimpangan Wilayah (KW) yang dapat dicapai di masing-masing terjadi di 25 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2004-2006, Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan

tingkat Ketimpangan Wilayah (KW) (dapat dilihat dari standar deviasi tahun 2004-2006, yaitu 0,691088 – 0,716871 – 0,820233), tetapi pada tahun 2007 tingkat ketimpangan wilayah mengalami penurunan (dapat dilihat dari standar deviasi dari 0,820233 – 0,759863), tetapi pada tahun 2008 tingkat Ketimpangan Wilayah (KW) kembali mengalami peningkatan (dapat dilihat dari standar deviasi tahun 2008 dari 0,759863 – 0,779729).

4.2 Analisis Data

Dalam penelitian dilakukan studi empirik dengan analisis data yang diperoleh dari sumber data (dapat dilihat pada 3.2). Analisis yang akan dilakukan adalah pengaruh variabel-variabel yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Adapun hasil dari analisis tersebut adalah:

Tabel 4.7
Estimasi Model Panel Least Square
Cross-Section Weights and White Cross-Section

Variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi				Variabel dependen: Ketimpangan Wilayah			
Variabel independen	Koefisien	std error	Ket	Variabel independen	koefisien	std error	ket
DF	0.0395752237172	0,006078	*	PE	1.37128484126	0,041878	*
PD	- 0.19361579121	0,082789	*	DF	- 0.0154277799	0,004965	*
TK	- 6.23661381829	3,700008	*	PD	-0.34907105256	0.054634	*
AG	109242,899707	0,646095	*	TK	- 6.7826486946	5,5608	*
-	-	-	-	AG	9.06341027868	0,631908	*
R ² = 0,875719				R ² = 0,923644			
adjusted R ² = 0,871576				adjusted R ² = 0,920466			
F-stat = 211,3880				F-stat = 287,8996			
* Signifikan pada level 5%							

Sumber: Lampiran C

4.2.1 Desentralisasi Fiskal - Pertumbuhan Ekonomi

Dalam penelitian akan dianalisis pengaruh variabel independen yaitu, derajat Desentralisasi Fiskal (DF), rasio Pajak Daerah (PD), jumlah Tenaga Kerja (TK), dan Aglomerasi (AG) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) dari 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Analisis datanya adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Pengujian Kelayakan Analisis regresi

4.2.1.1.1 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *Jarque-Bera test* (*J-B test*) untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Bila nilai JB hitung < nilai X^2 tabel, maka dikatakan data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Jarque-Bera (J-B)
Persamaan PE

Variabel	Nilai Jarque-Bera	X^2 tabel pada α 5%
PE	7,507419	94.6848* (df = 121)

Sumber : Lampiran D

Keterangan * = signifikan

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat nilai JB hitung untuk PE (7,507419) < nilai X^2 tabel pada df = 121 dan alpha (α) 5% (94.6848), hal ini berarti data variabel PE terdistribusi normal

4.2.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Masalah multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) regresi model utama dibandingkan dengan nilai R^2 regresi parsialnya atau dikenal dengan istilah korelasi parsial (*examination of partial correlation*). Bila didapati nilai R^2 regresi model utama lebih besar daripada nilai R^2 regresi parsialnya, maka dikatakan model yang diteliti tidak terkena masalah multikolinearitas.

Tabel 4.8 menunjukkan nilai R^2 hasil regresi parsial untuk masing-masing persamaan.

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi (R^2) Parsial
Persamaan PE

PE	Regresi Parsial Variabel Independen			
	DF	PD	TK	AG
$R^2 = 0.875719$	$R^2 = 0.693724$	$R^2 = 0.487117$	$R^2 = 0.567212$	$R^2 = 0.669056$

Sumber : Lampiran D

Dari rangkuman regresi parsial pada Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa nilai regresi R^2 pada persamaan regresi utama PE lebih besar dari nilai R^2 pada regresi parsial variabel independen PE ($R^2 = 0.875719$), yaitu DF ($R^2 = 0.693724$), PD ($R^2 = 0.487117$), TK ($R^2 = 0.567212$), AG ($R^2 = 0.669056$). Artinya, model estimasi regresi PE tidak terkena gejala multikolinearitas.

4.2.1.1.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (D-W test) untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu atau ruang. Bila nilai D-W statistik terletak antara $du < d < 4 - du$, maka model dikatakan bebas dari autokorelasi. Dari hasil estimasi didapat nilai D-W statistik pada PE sebesar 0,443759 pada *degree of freedom* 121 didapat nilai du sebesar 1,758, dl sebesar 1.592, dan $4-du$ sebesar 2,242 dan $4-dl$ sebesar 2,408. Maka dari data statistik tersebut dapat diinterpretasikan bahwa model memiliki autokorelasi positif..

Tabel 4.10
Nilai Durbin-Watson (D-W) Persamaan PE
Degree of freedom = 121

D	dl	Du	4 - du	4 - dl
0,443759	1.592	1,758	2,242	2,408

Sumber : Lampiran D

Dalam model regresi PE, autokorelasi positif yang muncul disebabkan adanya regresi lancung (*spurious regression*), dimana dalam model regresi PE memiliki koefisien determinasi (nilai F) tinggi, memiliki nilai R^2 tinggi, memiliki nilai signifikansi (t) tinggi, tetapi memiliki nilai Durbin-Watson (D-W) rendah (Winarno, 2009). Regresi lancung yang terdapat dalam model ini menjelaskan bahwa hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen memiliki data yang bersifat trend atau data runtun waktu, dimana data variabel dependen dan independen sama-sama menunjukkan kecenderungan meningkat dengan bertambahnya waktu. Data seperti ini tidak bersifat stasioner, tetapi bila

dianalisis secara bersama-sama akan bersifat stasioner, biasanya akan stasioner setelah didiferensi pada tahap pertama (Winarno, 2009). Keadaan tersebut menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel dependen dengan variabel independen signifikan pada jangka panjang (Gujarati, 2004).

Untuk menghilangkan autokorelasi positif yang terjadi akibat adanya regresi lancung pada model PE akan diperbaiki dengan TSEG (*Two Stage Engle-Granger*), yaitu dengan melakukan ECM (*Error Correction Model*) dua tahap. Setelah melakukan TSEG maka signifikasnsi dari residualnya baik. Dimana nilai t statistiknya 2,094 dengan Probabilitas adalah 0,038 (< 0,05), yang menunjukkan model koreksi kesalahan (ECM) yang digunakan sudah baik.

4.2.1.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini digunakan uji Park untuk melihat apakah di dalam penelitian terdapat masalah heterokedastisitas. Penelitian dikatakan memiliki masalah heteroskedastisitas apabila *error* atau residual model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke obsevasi lainnya. Dalam uji Park . Apabila koefisien parameter β dari persamaan (16) signifikan secara statistik, hal ini berarti data dari model empiris yang diestimasi terdapat heterokedastisitas.

$$\begin{aligned} \ln u^2_i &= \ln u^2 + \beta \ln X_i + v_i \\ &= \alpha + \beta \ln X_i + v_i \dots\dots\dots(\text{persamaan 16}) \end{aligned}$$

Dari hasil regresi nilai log residual kuadrat model, didapat hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Park (Log Res2) Persamaan PE

Variabel Independen	t-statistik	t-tabel
DF	-4,075532	1,980
PD	0,748308	1,980
TK	-7,800283	1,980
AG	2,924359	1,980

Sumber: Lampiran D

Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa dari empat variabel independen, tiga variabel bebas dari heteroskedastisitas yaitu PD, TK, dan AG, karena signifikansi $t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$, sedangkan untuk variabel DF terkena heteroskedastisitas karena signifikansi $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$. Variabel DF terkena heteroskedastisitas karena data variabel DF mengandung nilai-nilai dengan suatu jarak (*range*) yang lebar, yaitu jarak antara nilai yang paling kecil dan nilai yang paling besar adalah lebar.

4.2.1.2 Hasil Analisis Regresi

4.2.1.2.1 Estimasi Model Regresi

Adapun analisis regresi pertumbuhan ekonomi dapat sebagai berikut:

Dependent Variable: PE
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 10/07/10 Time: 15:25
 Sample: 2004 2008
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 25
 Total panel (balanced) observations: 125
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.172272	0.044870	182.1305	0.0000
DF	0.039575	0.006078	6.511421	0.0000
PD	-0.193616	0.082789	-2.338653	0.0210
TK	-6.24E-07	3.70E-08	-16.86054	0.0000
AG	10.21682	0.646095	15.81320	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.875719	Mean dependent var	15.01750
Adjusted R-squared	0.871576	S.D. dependent var	12.20044
S.E. of regression	0.278884	Sum squared resid	9.333169
F-statistic	211.3880	Durbin-Watson stat	0.328536
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.666244	Mean dependent var	8.578570
Sum squared resid	12.36898	Durbin-Watson stat	0.202069

Sumber : Lampiran C

Estimsai model regresi:

$$PE = C + \beta_1 DF + \beta_2 PD + \beta_3 TK + \beta_4 AG + \mu_t \dots\dots\dots (21)$$

Model Regresi :

$$PE = 8.17227174801 + 0.0395752237172*DF - 0.193615791212*PD - 6.23661381829e-07*TK + 10.2168206788*AG + \mu_t \dots\dots\dots(22)$$

4.2.1.2.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) menggambarkan kemampuan model regresi menjelaskan variabel dependennya, sedangkan nilai diluar koefisien determinasi ($1-R^2$) dijelaskan oleh faktor – faktor diluar model. Dari hasil estimasi, besarnya R^2 yang diperoleh untuk PE adalah sebesar 0.875719. Artinya variabel tingkat PE dalam model sebesar 87,5719 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang ada dalam model yaitu DF, PD, TK, dan AG. Sementara 12,4281 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini dan faktor-faktor lainnya.

Dari nilai koefisien determinasi tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa variabel-variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen dalam analisis ini. Sehingga dapat disimpulkan model ini baik dan dapat menjelaskan permasalahan dari penelitian ini.

4. 2.1.2.3 Uji Signifikasi Simultan (uji F)

Uji signifikansi parameter atau uji F dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari variabel – variabel independen secara bersama – sama atau keseluruhan. Parameternya adalah bila nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel atau nilai probabilitas F-stast lebih kecil dari nilai alpha (α) 1 persen, 5 persen atau 10 persen, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan variabel

– variabel independent dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Uji signifikansi F dapat dilihat pada Tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji Signifikansi F ($\alpha = 0,05$) Persamaan PE

Analisis	F-Statistik	F-Tabel
PE	680,82	2,45

Sumber : Lampiran E

Dari hasil regresi model, signifikansi simultan juga dapat dinilai dari Probabilitas F-Statistic 0,0000 yang lebih kecil dari nilai alpha (α) 5 persen (0,05) yang berarti dalam model tersebut variabel independennya secara keseluruhan atau serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Uji Signifikansi F (Prob 0,000000) Persamaan PE

Analisis	F-Statistik	Prob 0,00000
PE	680,82	0,000000

Sumber : Lampiran E

4.2.1.2.4 Uji Signifikansi Individu (uji t)

Uji signifikansi individu bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t hitung lebih besar dari nilai t

tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t- statistik yang lebih kecil dari nilai alpha (α) 1 persen, 5 persen, atau 10 persen.

Tabel 4.14
Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$) Persamaan PE

Analisis	t-statistik	t-tabel	Kesimpulan
DF	5,401	1,980	Signifikan
PD	-6,598	1,980	Signifikan
TK	-25,908	1,980	Signifikan
AG	44,136	1,980	Signifikan

Sumber : Lampiran E

Dari Tabel 4.14 dapat diinterpretasikan bahwa secara individu masing-masing variabel independen signifikan mempengaruhi PE sebagai variabel dependen. Signifikansi tersebut dapat dibuktikan dari nilai t-statistik variabel independen > t-tabel variabel independen secara individu.

4.2.1.3 Interpretasi Hasil Analisis

Dari persamaan PE (persamaan 22) dapat dilihat bahwa variabel-variabel independen (DF, PD, TK, AG) signifikan mempengaruhi variabel, dapat dibuktikan dengan nilai koefisien determinasinya (R^2) yang mencapai 0.875719 yang menginterpretasikan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota tersebut sebesar 87,5719 persen dan

sebesar 12,4281 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar faktor yang menjadi variabel penelitian dalam analisis ini (Gujarati, 2004).

1. Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Wagner dalam Mangkusobroto (1998) mengemukakan pendapat dalam bentuk sebuah hukum yang dikenal dengan Hukum Wanger sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Dari hukum wanger tersebut dapat dijelaskan bahwa ada hubungan yang saling tarik-menarik antara pendapatan per kapita masyarakat dengan pengeluaran pemerintah.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dengan asumsi pengeluaran pemerintah daerah diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa disaat pendapatan per kapita masyarakat meningkat maka akan mendorong penerimaan daerah yang merupakan indikator derajat desentralisasi fiskal suatu daerah meningkat. Maka dapat dideskripsikan juga bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Desentralisasi fiskal yang diterapkan pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tersebut semakin meningkat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri memberikan hasil yang baik terhadap masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

Kesimpulan tersebut dapat dibuktikan secara empiris, yaitu dapat dilihat dari perhitungan hubungan dari pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi nilai koefisien derajat desentralisasi fiskal pada model ekonometrik pertumbuhan ekonomi sebesar 0.039575 membuktikan bahwa derajat desentralisasi fiskal signifikan dan mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi. Artinya setiap peningkatan derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,039575 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen

Dari penjelasan teori dan studi empiris yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal yang dihitung dari penerimaan daerah signifikan dan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

2. Rasio Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Peacock dan Wiseman (Mangkoesebroto, 1998) mendasarkan teori mereka pada suatu pandangan dimana pemerintah senantiasa akan memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membayar pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman juga berpandangan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat memahami besarnya pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pandangan Peacock dan Wiseman tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terganggu karena pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah tetap sudah melebihi batas toleransi membayar pajak dari masyarakat. Keadaan ini akan mengganggu penerimaan daerah, yang menjadi indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pendapat Peacock dan Wiseman tentang tingkat toleransi masyarakat dapat juga disebabkan karena menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah seperti yang dijelaskan pada Teori Pigou. Pigou menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah dilihat dari barang public yang dihasilkan oleh pemerintah dimana barang publik harus disediakan sampai tingkat dimana kepuasan marginal sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik.

Dari studi empiris yang dilakukan pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, mengenai pengaruh rasio (pemungutan) pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemungutan (rasio) pajak daerah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. hal ini disebabkan karena besarnya pemungutan pajak daerah yang dilakukan pemerintah melebihi batas toleransi membayar pajak dari masyarakat, dan juga hasil dari program-program pemerintah yang didanai oleh pajak daerah ternyata menurunkan tingkat kepuasan marginal masyarakat. Keadaan ini akan mengakibatkan pertumbuhan

ekonomi yang menurun akibat pungutan (rasio) pajak yang besar dan diikuti dengan tingkat kepuasan masyarakat yang rendah akan menurunkan pendapatan per kapita dari masyarakat tersebut

Kesimpulan ini juga dibuktikan secara empiris, yaitu melalui perhitungan pengaruh rasio pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pada model ekonometrik pertumbuhan ekonomi, dimana pada model ini nilai koefisien variabel pajak daerah sebesar -0.193616 , yang artinya bahwa rasio pajak daerah signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi pengaruh yang ditimbulkan pajak daerah adalah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana setiap pemungutan pajak daerah ditingkatkan sebesar 0.193616 maka akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1 persen.

Dari penjelasan teori dan studi empiris yang dilakukan pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa Rasio Pajak Daerah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

3. Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam Teori Fungsi Produksi Neo-Klasik (Sukirno, 2004), tenaga kerja merupakan salah satu faktor input (faktor input: modal dan tenaga kerja). Yang artinya tenaga kerja menjadi salah satu indikator untuk menentukan produktifitas produksi. Dalam sektor makro tenaga kerja menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, karena tenaga kerja akan menghasilkan pendapatan, pendapatan yang dihasilkan setiap individu tenaga kerja disebut pendapatan per kapita. Pendapatan

per kapita akan dikonsumsi, di investasikan, dan digunakan untuk membiayai program-program pemerintah melalui pungutan pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah.

Dalam Teori Fungsi Produksi Neo-Klasik (Sukirno, 2004), dijelaskan bahwa tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan produksi, dimana peningkatan marginal jumlah tenaga kerja akan meningkatkan marginal produksi. Peningkatan marginal produksi akan terus bertambah jika jumlah tenaga kerja terus ditambah hingga mencapai jumlah produksi maksimal. Pada saat jumlah produksi maksimal (*maximum total production, TP max*), penambahan jumlah tenaga kerja akan menurunkan jumlah produksi (TP) sehingga marginal produksi akan bernilai negatif.

Tenaga kerja pada suatu daerah merupakan indikator pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tetapi jika keadaan suatu daerah yang tingkat marginal produksinya sudah bernilai negatif, tetap menambah jumlah tenaga kerja dengan asumsi lapangan pekerjaan yang tetap, justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, karena penambahan jumlah tenaga kerja pada kondisi produktifitas tenaga kerja sudah maksimal, jika ditambah maka akan terjadi inefisiensi tenaga kerja, sehingga akan menurunkan jumlah produksi daerah (pendapatan per kapita) tersebut.

Kondisi yang terjadi pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa saat penambahan jumlah tenaga kerja (dengan asumsi lapangan kerja tetap) terjadi pertumbuhan ekonomi justru menurun dari tahun sebelumnya, sehingga dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pada daerah-

daerah di Propinsi Jawa Barat kondisi tenaga kerja sudah inefisiensi, karena jumlah produksi sudah mencapai titik maksimal (*TP max*).

Kesimpulan ini juga dibuktikan melalui studi empiris, yaitu melalui perhitungan pengaruh jumlah pertumbuhan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dimana nilai koefisien tenaga kerja pada model ekonometrik pertumbuhan ekonomi adalah -6.2407, yang artinya tenaga kerja signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi memiliki pengaruh yang negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap penambahan jumlah tenaga kerja sebesar 6,2407 akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen.

Dari studi teori dan empiris tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pertumbuhan tenaga kerja pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat signifikan dan mempengaruhi secara negatif pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

4. Tingkat Aglomerasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Teori kutub pertumbuhan (Tarigan, 2004) menjelaskan bahwa pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi usaha atau konsentrasi industry yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar.

Tingkat aglomerasi dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan yang ditinjau dari PDRB wilayah tersebut dibandingkan dengan PDRB propinsi. Maka dari teori kutub pertumbuhan (Tarigan, 2004) tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat aglomerasi

suatu daerah akan menstimulasi kehidupan daerah tersebut, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, tingkat aglomerasinya bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa aglomerasi yang terjadi di setiap kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat signifikan mendorong masing-masing pertumbuhan ekonomi daerah meningkat.

Kesimpulan ini dapat dibuktikan dari studi empiris, melalui perhitungan pengaruh tingkat aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada model ekonometrik pertumbuhan ekonomi koefisien tingkat aglomerasi bernilai 10.2168, yang artinya setiap pertumbuhan aglomerasi meningkat sebesar 10,2168 akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sebesar 1 persen.

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat aglomerasi signifikan dan memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

4.2.2 Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Wilayah

Dalam penelitian akan dianalisis pengaruh variabel independen yaitu, Pertumbuhan Ekonomi (PE), derajat Desentralisasi Fiskal (DF), rasio Pajak Daerah (PD), jumlah Tenaga Kerja (TK), dan Aglomerasi (AG) terhadap Ketimpangan Wilayah dari 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Analisis datanya adalah sebagai berikut:

4.2.2.1 Pengujian Kelayakan Analisis Regresi

4.2.2.1.1 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *Jarque-Bera test* (*J-B test*) untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Bila nilai JB hitung $<$ nilai X^2 tabel, maka dikatakan data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Hasil Uji Jarque-Bera (J-B)
Persamaan KW

Variabel	Nilai Jarque-Bera	X^2 tabel pada α 5%
KW	12,34082*	94.7493 (df = 120)

Sumber : Lampiran D

Keterangan * = signifikan

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilihat nilai JB hitung untuk nilai JB hitung KW (12,34082) $<$ nilai X^2 tabel pada df = 120 dan alpha (α) 5% (94.7493), hal ini berarti data variabel PE terdistribusi dengan normal.

4.2.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Masalah multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) regresi model utama dibandingkan dengan nilai R^2 regresi parsialnya atau dikenal dengan istilah korelasi parsial (*examination of partial correlation*). Bila didapati nilai R^2 regresi model utama lebih besar daripada nilai R^2 regresi parsialnya, maka dikatakan model yang diteliti tidak terkena masalah multikolinearitas.

Tabel 4.16 menunjukkan nilai R^2 hasil regresi parsial untuk masing-masing persamaan.

Tabel 4.16
Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Parsial
Persamaan KW

KW	Regresi Parsial Variabel Independen				
	PE	DF	PD	TK	AG
$R^2 = 0.923644$	$R^2 = 0.691194$	$R^2 = 0.748092$	$R^2 = 0.523028$	$R^2 = 0.630744$	$R^2 = 0.762406$

Sumber : Lampiran D

Dari rangkuman regresi parsial pada Tabel 4.16, dapat dilihat bahwa nilai regresi R^2 pada persamaan regresi utama KW ($R^2 = 0.923644$) lebih besar dari nilai R^2 pada regresi parsial variabel independen yaitu KW yaitu, PE ($R^2 = 0.691194$), DF ($R^2 = 0.748092$), PD ($R^2 = 0.523028$), TK ($R^2 = 0.630744$), AG ($R^2 = 0.762406$). Artinya, model estimasi regresi PE tidak terkena gejala multikolinearitas.

4.2.2.1.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (D-W test) untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu atau ruang. Bila nilai D-W statistik terletak antara $du < d < 4 - du$, maka model dikatakan bebas dari autokorelasi. Dari hasil estimasi didapat nilai D-W statistik pada KW sebesar 0,42893 pada *degree of freedom* 120 didapat nilai du sebesar 1,758, dl sebesar 1.592, dan $4-du$ sebesar 2,242 dan $4-dl$ sebesar 2,408. Maka dari data statistik tersebut dapat diinterpretasikan bahwa model memiliki autokorelasi positif.

Tabel 4.17
Nilai Durbin-Watson (D-W)
Degree of freedom = 120 Persamaan KW

D	dl	Du	4 - du	4 - dl
0,42893	1.550	1,780	2,250	2,220

Sumber : Lampiran D

Dalam model regresi KW, autokorelasi positif yang muncul disebabkan adanya regresi lancung (*spurious regression*), dimana dalam model regresi PE memiliki koefisien determinasi (nilai F) tinggi, memiliki nilai R^2 tinggi, memiliki nilai signifikansi (t) tinggi, tetapi memiliki nilai Durbin-Watson (D-W) rendah (Winarno, 2009). Regresi lancung yang terdapat dalam model ini menjelaskan bahwa hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen memiliki data yang bersifat trend atau data runtun waktu, dimana data variabel dependen dan independen sama-sama menunjukkan kecenderungan meningkat dengan bertambahnya waktu. Data seperti ini tidak bersifat stasioner, tetapi bila dianalisis secara bersama-sama akan bersifat stasioner, biasanya akan stasioner setelah didiferensi pada tahap pertama (Winarno, 2009). Keadaan tersebut menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel dependen dengan variabel independen signifikan pada jangka panjang (Gujarati, 2004).

Untuk menghilangkan autokorelasi positif yang terjadi akibat adanya regresi lancung pada model KW akan diperbaiki dengan TSEG (*Two Stage Engle-Granger*), yaitu dengan melakukan ECM (*Error Correction Model*) dua tahap. Setelah melakukan TSEG maka signifikasnsi dari residualnya baik. Dimana nilai t

statistiknya 2,094 dengan Probabilitas adalah 0,038 ($< 0,05$), yang menunjukkan model koreksi kesalahan (ECM) yang digunakan sudah baik.

4.2.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini digunakan uji Park untuk melihat apakah di dalam penelitian terdapat masalah heterokedastisitas. Penelitian dikatakan memiliki masalah heteroskedastisitas apabila *error* atau residual model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke obsevasi lainnya. Dalam uji Park . Apabila koefisien parameter β dari persamaan (16) signifikan secara statistik, hal ini berarti data dari model empiris yang diestimasi terdapat heterokedastisitas.

$$\begin{aligned} \ln u^2_i &= \ln u^2 + \beta \ln X_i + v_i \\ &= \alpha + \beta \ln X_i + v_i \dots\dots\dots(\text{persamaan 16}) \end{aligned}$$

Dari hasil regresi nilai log residual kuadrat model, didapat hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Park (Log Res2) Persamaan KW

Variabel Independen	t-statistik	t-tabel
PE	-4.075532	1,980
DF	0.748308	1,980
PD	-7.800283	1,980
TK	2.924359	1,980
AG	-4.075532	1,980

Sumber: Lampiran D

Dari Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa dari empat variabel independen, tiga variabel bebas dari heteroskedastisitas yaitu PE, DF, dan AG, karena signifikansi t-statistik < t-tabel, sedangkan untuk variabel DF terkena heteroskedastisitas karena signifikansi t-statistik > t-tabel. Variabel PD dan TK terkena heteroskedastisitas karena data variabel DF mengandung nilai-nilai dengan suatu jarak (*range*) yang lebar, yaitu jarak antara nilai yang paling kecil dan nilai yang paling besar adalah lebar.

4.2.2.2 Hasil Analisis Regresi

4.2.2.2.1 Estimasi Model Regresi

Adapun analisis regresi pertumbuhan ekonomi dapat sebagai berikut:

Dependent Variable: KW
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 10/07/10 Time: 16:11
 Sample: 2004 2008
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 25
 Total panel (balanced) observations: 125
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.78774	0.354511	-30.42991	0.0000
PE	1.371285	0.041878	32.74497	0.0000
DF	-0.015428	0.004965	-3.107000	0.0024
PD	-0.349071	0.054634	-6.389283	0.0000
TK	-6.78E-07	5.56E-08	-12.18981	0.0000
AG	9.063410	0.631098	14.36133	0.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.923644	Mean dependent var	0.942734
Adjusted R-squared	0.920436	S.D. dependent var	1.414250
S.E. of regression	0.379318	Sum squared resid	17.12197
F-statistic	287.8996	Durbin-Watson stat	0.198219
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.848902	Mean dependent var	0.751304
Sum squared resid	24.76406	Durbin-Watson stat	0.092925

Sumber : Lampiran C

Estimasi model regresi:

$$KW = C + \beta_1 PE + \beta_2 DF + \beta_3 PD + \beta_4 TK + \beta_5 AG + \mu_{it} \dots \dots \dots (23)$$

Model Regresi :

$$KW = -10.7877386008 + 1.37128484126 * PE - 0.0154277799616 * DF - 0.349071052567 * PD - 6.78264869463e-07 * TK + 9.06341027868 * AG \dots \dots \dots (24)$$

4.2.2.2.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) menggambarkan kemampuan model regresi menjelaskan variabel dependennya, sedangkan nilai diluar koefisien determinasi ($1-R^2$) dijelaskan oleh faktor – faktor diluar model. Dari hasil estimasi, besarnya R^2 yang diperoleh untuk tingkat KW adalah sebesar 0.923644. Artinya variabel tingkat KW dalam model sebesar 92,3644 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang ada dalam model yaitu PE, DF, PD, TK, dan AG. Sementara 7,6356 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini dan faktor-faktor lainnya.

Dari nilai koefisien determinasi tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa variabel-variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen dalam analisis ini. Sehingga dapat disimpulkan model ini baik dan dapat menjelaskan permasalahan dari penelitian ini.

4.2.2.2.3 Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Uji signifikansi parameter atau uji F dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari variabel – variabel independent secara bersama – sama atau keseluruhan. Parameternya adalah bila nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel atau nilai probabilitas F-stast lebih kecil dari nilai alpha (α) 1 persen, 5 persen atau 10 persen, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan variabel – variabel independent dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Uji signifikansi F dapat dilihat pada Tabel 4.19 sebagai berikut:

Tabel 4.19
Uji Signifikansi F ($\alpha = 0,05$) Persamaan KW

Analisis	F-Statistik	F-Tabel
PE	287.8996	2,29

Sumber : Lampiran E

Dari hasil regresi model, signifikansi simultan juga dapat dinilai dari Probabilitas F- Statistic 0,0000 yang lebih kecil dari nilai alpha (α) 5 persen (0,05) yang berarti dalam model tersebut variabel independennya secara keseluruhan atau serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.20 berikut ini.

Tabel 4.20
Uji Signifikansi F (Prob 0,000000)

Analisis	F-Statistik	Prob 0,00000
PE	287.8996	0,000000

Sumber : Lampiran E

4.2.2.2.4 Uji Signifikansi Individu (uji t)

Uji signifikansi individu bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t- statistik yang lebih kecil dari nilai alpha (α) 1 persen, 5 persen, atau 10 persen.

Tabel 4.21
Uji Signifikansi t ($\alpha = 0,05$) Persamaan KW

Analisis	t-statistik	t-tabel	Kesimpulan
PE	-30.42991	1,980	Signifikan
DF	32.74497	1,980	Signifikan
PD	-3.107000	1,980	Signifikan
TK	-6.389283	1,980	Signifikan
AG	-12.18981	1,980	Signifikan

Sumber : Lampiran E

Dari Tabel 4.21 dapat di intepretasikan bahwa secara inividu masing-masing variabel independen signifikan mempengaruhi KW sebagai variabel dependen. Signifikansi tersebut dapat dbuktikan dari niai t-statistik variabel independen > t-tabel variabel independen secara individu.

4.2.2.3 Interpretasi Hasil Analisis

Dari model regresi di atas, sesuai dengan *recursive model* dapat dilihat bahwa variabel-variabel independen terdiri atas dua yaitu pertumbuhan ekonomi (PE) dan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari variabel-variabel

sebagai berikut; derajat desentralisasi fiskal (DF), rasio pajak daerah (PD), tenaga kerja (TK), dan tingkat aglomerasi daerah (AG). Secara empirik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen, dapat dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) yang mencapai 0.923644 yang mengintrepetasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan desentralisasi fiskal pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat sebesar 92,3644 persen dan sebesar 7,6356 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel-variabel penelitian ini (Gujarati, 2004).

1. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah

Teori Kurva U terbalik (*U reverse*) Kuznet (Kuncoro, 1997) yaitu pertumbuhan ekonomi suatu Negara akan mendorong peningkatan ketimpangan antar wilayah dalam Negara tersebut pada tahap awal pembangunan ekonomi, dan akan secara bertahap menurun saat pembangunan ekonomi mencapai titik satabil (*steady state*).

Pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, masing-masing kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan meningkat seperti yang dapat dibuktikan pada model persamaan pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Tetapi yang menjadi fenomena adalah perkembangan masing-masing daerah di Propinsi Jawa Barat masih dalam proses menuju posisi *steady state*, sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing

kabupaten/kota juga meningkat ketimpangan antar wilayah di Propinsi Jawa Barat.

Kesimpulan ini dapat dibuktikan dari perhitungan pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap ketimpangan wilayah, yang tertera pada model ekonometrik persamaan ketimpangan wilayah, dimana koefisien pertumbuhan ekonomi bernilai 1.371285, yang artinya setiap pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sebesar 1.371285 maka akan mendorong peningkatan ketimpangan wilayah sebesar 1 persen.

Maka dapat disimpulkan dari studi teori dan empiris bahwa pertumbuhan ekonomi daerah signifikan dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Wilayah

pengeluaran pemerintah daerah diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah, maka disaat pendapatan per kapita masyarakat meningkat maka akan mendorong penerimaan daerah yang merupakan indikator derajat desentralisasi fiskal suatu daerah meningkat. Maka dapat dideskripsikan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Desentralisasi fiskal yang diterapkan pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif mendorong pendapatan per kapita di daerah-daerah tersebut semakin meningkat. Kebijakan

pengelolaan keuangan daerah secara mandiri memberikan hasil yang baik terhadap masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. berbeda dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan, derajat desentralisasi fiskal yang meningkat di masing-masing daerah secara bertahap akan mendorong pemerataan antar wilayah. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori kutub pertumbuhan (Tarigan, 2004) yaitu semakin banyak kutub pertumbuhan dalam suatu daerah maka akan semakin rata distribusi pendapatan daerah tersebut, walaupun daerah-daerah kumuh (*slum*) akan muncul. Tetapi lambat laun daerah ini akan berkurang seiring dengan munculnya kutub-kutub pertumbuhan ekonomi yang baru.

Kesimpulan ini juga dapat dibuktikan melalui studi empiris yang dilakukan pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, yaitu melalui perhitungan pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah. Dimana pada persamaan model ekonometri ketimpangan wilayah nilai koefisien derajat desentralisasi fiskal sebesar -0.015428 menginterpretasikan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal sebesar 0.015428 akan mendorong ketimpangan wilayah menurun sebesar 1 persen.

Maka dapat disimpulkan dari studi teori dan empiris bahwa derajat desentralisasi fiskal signifikan dan mempengaruhi secara negatif ketimpangan wilayah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

3. Rasio (Pemungutan) Pajak Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah

Wagner dalam Mangkusoebroto (1998) mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga di dasarkan pula pengamatan di Negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukum, sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah juga akan meningkat.

Peningkatan pendapatan per kapita harus dikontrol oleh pemerintah, agar dapat menekan angka ketimpangan (*disparity*) yang terjadi antar wilayah. Peranan pemerintah melalui pemungutan pajak dibutuhkan untuk memperlancar arus distribusi pendapatan ke daerah-daerah yang pertumbuhannya rendah.

Pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat besaran pungutan pajak berhasil menurunkan ketimpangan antar wilayah di Propinsi Jawa Barat. hal ini dapat dibuktikan dari perhitungan pengaruh tingkat rasio (pemungutan) pajak daerah terhadap ketimpangan wilayah, dimana pada model ekonometrik persamaan ketimpangan wilayah koefisien pajak daerah sebesar -0.349071 menginterpretasikan peningkatan rasio (pemungutan) pajak daerah sebesar 0.349071 akan mendorong ketimpangan wilayah menurun sebesar 1 persen.

Dari studi teori dan empiris tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio (pemungutan) pajak daerah signifikan dan mempengaruhi secara negatif terhadap ketimpangan wilayah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

4. Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Wilayah

Dalam Teori Fungsi Produksi Neo-Klasik (Sukirno, 2004), tenaga kerja merupakan salah satu faktor input (faktor input: modal dan tenaga kerja). Yang artinya tenaga kerja menjadi salah satu indikator untuk menentukan produktifitas produksi. Dalam sektor makro tenaga kerja menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, karena tenaga kerja akan menghasilkan pendapatan, pendapatan yang dihasilkan setiap individu tenaga kerja disebut pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita akan dikonsumsi, di investasikan, dan digunakan untuk membiayai program-program pemerintah melalui pungutan pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah.

Teori Fungsi Produksi Neo-Klasik (Sukirno, 2004), juga menjelaskan bahwa tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan produksi, dimana peningkatan marginal jumlah tenaga kerja akan meningkatkan marginal produksi. Peningkatan marginal produksi akan terus bertambah jika jumlah tenaga kerja terus ditambah hingga mencapai jumlah produksi maksimal.

Peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga akan mendorong penurunan tingkat ketimpangan antar wilayah karena tingkat pendapatan per kapita secara bertahap akan merata di setiap daerah dengan asumsi *full of employment*.

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan studi empiris, melalui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap ketimpangan wilayah, dimana pada model ekonometrik koefisien tenaga kerja sebesar -6.7807 menginterpretasikan

peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 6.7807 akan mendorong ketimpangan wilayah menurun sebesar 1 persen.

Dari studi teori dan empiris tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja signifikan dan mempengaruhi secara negatif terhadap ketimpangan wilayah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

5. Aglomerasi terhadap Ketimpangan Wilayah

pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi usaha atau konsentrasi industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (Tarigan, 2004).

Pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, perbedaan kemampuan tiap-tiap daerah untuk mampu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan menjadi salah satu fenomena yang menyebabkan ketimpangan wilayah tetap terjadi walaupun aglomerasi berjalan dengan baik pada masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Beberapa daerah yang mampu menciptakan kutub-kutub pertumbuhan yang lebih banyak di bandingkan dengan daerah lain memberikan efek stimulus kehidupan ekonomi yang dinamis hanya terjadi di beberapa daerah tersebut, sedangkan di daerah-daerah yang hanya memiliki kutub pertumbuhan yang jumlahnya sedikit, juga mengalami stimulus kehidupan ekonomi tetapi tidak sedinamis daerah-daerah yang memiliki kutub pertumbuhan yang lebih banyak. Aglomerasi akan mendorong pertumbuhan

ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang sama-sama meningkat tetapi tidak merata besarnya akan menumbuhkan efek disparitas antar wilayah.

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan studi empiris, melalui pengaruh tingkat aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah, dimana pada model ekonometrik persamaan ketimpangan wilayah koefisien aglomerasi sebesar - 9.063410 menginterpretasikan peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 9.063410 akan mendorong ketimpangan wilayah meningkat sebesar 1 persen.

Dari studi teori dan empiris tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat aglomerasi signifikan dan mempengaruhi secara positif terhadap ketimpangan wilayah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan persamaan regresi berganda (*Simultaneous regression*) dengan Model berulang (*Recursive Models*) serta metode yang digunakan adalah PLS (*Panel Least Square*) dengan *Cross-Section Weight* dan *White Cross-Section* yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah pada 25 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama lima tahun periode penelitian yaitu 2004 – 2008, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi signifikan dan positif dipengaruhi oleh derajat desentralisasi fiskal, dan tingkat aglomerasi suatu daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal dan tingkat aglomerasi suatu wilayah atau daerah maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya pajak daerah dan tenaga kerja memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana semakin tinggi rasio pajak daerah dan jumlah penyerapan tenaga kerja justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Fenomena tentang jumlah tenaga kerja yang justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, terjadi karena kondisi produktifitas marjinal yang sudah mencapai titik negatif, dimana penambahan jumlah tenaga kerja akan menurunkan PDRB. Maka dari kesimpulan ini

dapat dibuktikan bahwa hipotesis awal peneliti diterima kecuali tenaga kerja hipotesis peneliti ditolak. Maka dapat disimpulkan desentralisasi fiskal di Propinsi Jawa Barat signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat, baik pengaruhnya positif maupun negatif.

2. Ketimpangan wilayah yang terjadi di Propinsi Jawa Barat, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal. Pertama, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini disebabkan saling berbedanya kemampuan antar masing-masing daerah atau wilayah di Propinsi Jawa Barat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah juga akan mendorong peningkatan ketimpangan wilayah. Kedua, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan wilayah. Secara umum akan menurunkan ketimpangan, antara lain; peningkatan derajat desentralisasi fiskal, penyesuaian rasio pajak daerah, dan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, akan mendorong ketimpangan semakin rendah. Tetapi untuk tingkat aglomerasi wilayah atau daerah justru memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah, yang maksudnya proses pengkotaan yang bervariasi di tiap daerah akan mendorong semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dari kesimpulan tersebut maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima. Maka dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi

fiskal signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah, baik secara positif maupun negatif hubungannya.

5.2 Saran

Adapun saran yang akan diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota dari 25 kabupaten/kota serta Pemerintah Propinsi di Propinsi Jawa barat harus memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing
2. Pemerintah kabupaten/kota dari 25 kabupaten/kota serta Pemerintah Propinsi di Propinsi Jawa barat, harus menumbuhkan lapangan kerja yang baru agar dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang terus meningkat tiap tahunnya, agar produktifitas marjinal tenaga kerja tidak menurun bahkan sampai mencapai titik negatif.
3. Pengendalian rasio pajak daerah, pengembangan program-program desentralisasi fiskal dan peningkatan daya serap tenaga kerja harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, agar dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah di Propinsi Jawa Barat.
4. Untuk penelitian yang akan meneliti tentang thema dan masalah yang sama maupun menyerupai agar menambah jumlah variabel penelitian agar dapat memberikan hasil analisis yang lebih riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2009. **PDRB Propinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota**. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. Bandung
- Badan Pusat Statistik. **Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun**. Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Bandung
- Boediono. 1992. **Teori Pertumbuhan Ekonomi**. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE Uneversitas Gajah Mada.
- Bonet, Jaime. 2006. **Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: evidence from the Colombian experience**. original version.
- Ebel, Robert D dan Seidar Yilmaz. 2002. **Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview**. World Bank Institute. Available: <http://www.worldbank.org>
- Gujarati, Damodar N. 2003. **Basic Econometrics Fourth Edition**. The Mc. Growth Hill Compnies Inc. New York
- Hefrizal, Handra. 2002. **Horizontal Fiscal Disparities and Local Services Inequalities: A Survey of Eight Years Fiscal Decentralisation in Indonesia**. Available: <http://www.hefrizal@yahoo.com>
- Hirseman, Alberto. 1970. **Teori dan Praktek Otonomi Daerah**. Jakarta: Grafindo.
- Jinghan, M L. 1990. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**. Penerjemah D. Guritno. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jin, Jing dan Heng-Fu Zou. 2000. **Fiscal Decentralization and Economic Growth in China**. World Bank Working Paper Series. Working Paper Series 1452. Avaliable: <http://www.worldbank.org>

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. **Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang**. Yogyakarta: Erlangga
- Mangkoesobroto, Guritno. 1997. **Ekonomi Publik**. Yogyakarta: BPFE
- Pose et all. 2007. **Fiscal Decentralization, Efficiency and Growth**. Department Of Geography and Environmental, London School of Economics. Available: <http://www.iza.org>
- Rasyid, M. Ryaas. 2005. **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**. Editor: Syamsudin Haris. Lembaga Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus. 1994. **Pembangunan Ekonomi** (edisi Terjemahan). Edisi ke-12. Jakarta: Erlangga
- Simanjuntak, Robert A. 2005. **Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun**. Editor: Anhar Ganggang. Jakarta: yayasan Tifa.
- Slinko, Irina. 2002. **Fiscal Decentralization on The Budget Revenue Inequity among Municipalities and Growth Russian Regions**. Available: <http://www.econpapers.repec.org>
- Suparmoko, M. 1994. **Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek**. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Suparmoko, M. 2001. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Edisi Pertama. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. **Pembngunan Ekonomi**. Edisi ke Sembilan. Jakarta: Erlangga.
- Tarigan, Robinson. 2004. **Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi**. Jakarta: Bumi Aksara
- Vasquez, Jorge Martinez dan Robert M Mc. Nab. 2001. **Fiscal Decentralization and Economic Growth**, Working Papers, Andrew Young School of Policy Studies. Available: <http://www.ecopapers.repec.org>

Woller, Gary M. dan Kerk Phillips. 1998. **Fiscal Decentralization and LDC Economy Growth: An Empirical Studies**. Vol. 34, No. 4. Department Of Economics. Brigham Young Unverisity.

_____, 2006. **RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009**. Jakarta: Sinar Grafika.

_____, **UU No. 32 /2004 dan UU No. 33/2004**, Jakarta: Cemerlang.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

A

DATA MENTAH

Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB/Kapita ADHK 2000 (Ribu)	TPD (Ribu)	PAD (Ribu)	PD (Ribu)	TK	Jumlah Penduduk
Kab. Bogor	2004	5999.628429	1029473896.08	106290112.97	91308027.06	1340253	3945411
	2005	6109.827664	1287081933.21	129424944.04	106856500.19	1399531	4100934
	2006	6296.211790	1547452042.49	186830346.06	120021444.05	1453567	4216186
	2007	6522.117882	1702362062.43	195371124.23	141040387.58	1455910	4316236
	2008	6751.663893	1862663211.00	241981538.00	158833452.00	1470487	4402026
Kab. Sukabumi	2004	3089.465547	569513984.00	28684009.00	8342078.00	823478	2210091
	2005	3202.706705	680207162.00	40633014.00	8787706.00	831625	2224993
	2006	3304.474406	897128905.00	53645187.00	9845572.00	887261	2240901
	2007	3416.357689	1107104025.62	67594424.97	11234399.21	897200	2258253
	2008	3519.951516	1222160912.79	87402425.00	13959928.72	900258	2277020
Kab. Cianjur	2004	3159.708095	565060808.47	38691455.05	10313396.46	805245	2079306
	2005	3250.193935	569316456.60	48191213.73	13483779.11	821876	2098644
	2006	3316.669984	850496667.29	65780144.21	15683888.89	855530	2125023
	2007	3416.745730	1066918580.00	69388785.00	17541078.00	860828	2149121
	2008	3520.763287	1198714394.00	77905506.00	19090941.00	876044	2169984
Kab. Bandung	2004	5390.663845	1114660529.39	109581843.46	47453337.40	1481516	4002290

	2005	5340.842518	1201400619.98	108322354.67	45865452.89	1463108	4263934
	2006	5409.885596	1595635583.00	137532496.00	57334770.00	1542607	4399128
	2007	6150.021823	1749960013.59	152407266.00	62716080.00	1544241	3038038
	2008	6313.750459	1657286086.32	144138083.00	51564333.70	1582854	3116056
Kab. Garut	2004	3723.991120	633974814.59	40459795.59	4936516.01	816476	2260478
	2005	3777.564849	701732953.60	50323323.28	6354522.06	849415	2321072
	2006	3842.616464	1049101069.00	62952613.00	6472578.00	862163	2375725
	2007	3936.740455	1204871939.84	79096666.00	7820442.30	884859	2429167
	2008	4034.300622	1364183604.37	83496425.00	7860568.81	886044	2481471
Kab. Tasikmalaya	2004	2662.347097	486735642.00	20844627.00	3999114.00	736416	1569292
	2005	2561.000166	525435323.17	21865633.77	4269355.60	715583	1693479
	2006	2587.585555	895808582.39	73877575.39	42707787.42	720904	1743324
	2007	2626.539262	956896501.00	34725529.00	5174671.00	808334	1792092
	2008	2661.329512	1037927303.00	48978171.00	10190910.00	863367	1839682
Kab. Ciamis	2004	3698.139374	550373918.52	32368071.32	4975907.97	714612	1522928
	2005	3818.077983	871203820.59	29984042.32	5065796.11	721554	1542661
	2006	3907.685093	881203820.59	30984042.32	5015708.60	727902	1565121
	2007	4048.986303	1052791391.70	54711929.11	5477835.88	784173	1586076
	2008	4196.424290	1162633816.10	46847498.00	6882627.10	797136	1605891
Kab. Kuningan	2004	2863.473889	410051070.00	24415208.00	5599166.00	434484	1073172
	2005	2915.627325	442791063.00	31181897.00	6216767.00	435762	1096848
	2006	2976.467139	637585691.00	35729686.00	6154903.00	513934	1118776
	2007	3041.786432	766796218.00	43507886.00	7596470.00	524770	1140777
	2008	3111.354510	842402465.00	42825180.00	8251000.00	525539	1163159

Kab Cirebon	2004	2896.517846	581585244.72	48221232.03	17103874.70	804608	2084572
	2005	3009.604738	619210419.78	53035103.76	20624369.18	826834	2107918
	2006	3124.625232	928621624.00	92300035.00	23820977.00	828446	2134656
	2007	3270.071265	1014368236.43	100692757.87	26146859.24	843498	2162644
	2008	3362.383990	1118407022.11	101752670.00	30061199.79	844856	2192492
Kab. Majalengka	2004	2858.806847	433218449.00	25303586.00	2879369.00	495728	1184760
	2005	2969.391266	476455616.00	32464181.00	3648712.00	504676	1191490
	2006	3076.810067	701153455.00	50043010.00	4045784.00	527927	1197994
	2007	3209.953013	796759306.00	40020646.00	4080079.00	576147	1204379
	2008	3338.258407	874070166.00	45670008.00	4827279.00	576818	1210811
Kab. Sumedang	2004	4131.922480	463936405.04	50093459.49	16492765.08	414520	1043340
	2005	4221.626985	492436373.35	58699239.12	18183246.27	419145	1067361
	2006	4306.860607	694912672.05	71954644.79	18197017.14	468113	1089889
	2007	4415.931877	790837252.12	69493500.68	22338144.77	507674	1112336
	2008	4528.832184	890461213.96	87633522.00	25313122.68	514095	1134288
Kab. Indramayu	2004	7643.053563	541720356.00	37911767.00	9478437.00	766150	1749170
	2005	7000.566953	619478944.00	40247132.00	10345972.00	705442	1760286
	2006	7096.844572	848757051.00	51147530.00	12301610.00	710300	1778396
	2007	7216.331769	967657718.89	47704563.37	12800203.00	720973	1795372
	2008	7354.158709	1036791622.00	56770811.00	18354645.00	741242	1811764
Kab. Subang	2004	4004.332697	492036511.00	38713505.00	11130433.00	568643	1406976
	2005	4237.773854	492036511.00	38713505.00	12406943.24	571525	1421973
	2006	4283.956811	741736229.02	51753385.23	12320000.00	588167	1441191
	2007	4436.366278	852107946.00	60055414.00	17028415.00	647108	1459077

	2008	4592.195435	932808405.00	66520934.00	17940088.00	649879	1476418
Kab. Purwakarta	2004	7296.572045	331799488.00	35807322.00	17848346.00	281010	760220
	2005	7450.756494	354721130.00	40549708.00	18049196.00	284400	770660
	2006	7599.417429	501547962.00	51781131.00	22389140.00	287061	784797
	2007	7763.018119	564425061.46	50324496.71	19582164.34	320090	798272
	2008	8032.475598	633409966.00	59429025.00	20766422.00	321647	809962
Kab. Karawang	2004	6920.750600	657649963.59	74148176.44	69476148.02	624351	1939674
	2005	7292.601535	737735082.35	82505582.60	33777981.87	650133	1985574
	2006	7664.706508	970982198.20	110660632.68	47082431.12	714152	2031128
	2007	7970.170101	1080857138.24	121414897.65	53093214.21	732948	2073356
	2008	8309.375966	1122136461.39	131785039.00	58543986.50	854404	2112433
Kab. Bekasi	2004	20329.660013	894380796.36	114153425.36	62225216.36	696764	1917248
	2005	21152.566321	860627129.40	150017838.3	68606169.35	720896	1953380
	2006	24001.747664	900649135.72	172659681.14	80681964.18	742586	1991230
	2007	22874.417817	1126463252.72	196320104.85	91612573.05	734633	2032008
	2008	23746.884853	1398270356.71	249063807.00	105513220.24	741311	2076146
Kota Bogor	2004	4032.282253	380532282.00	49163187.00	20962984.00	264216	833523
	2005	4222.411095	413750977.00	73371081.00	26535068.00	272459	844778
	2006	4419.019310	588726694.72	74935697.82	27237460.42	289731	855846
	2007	4633.767265	633568643.66	79819169.55	37504974.25	308277	866034
	2008	4853.382875	718082583.03	97767320.00	45988776.97	377388	876296
Kota Sukabumi	2004	4816.498933	121420068.00	16949814.00	3290218.00	84378	278418
	2005	4938.142897	233948016.00	27577624.00	3786646.00	89816	287760
	2006	5121.399917	343281794.00	43564079.00	4365066.00	94518	294646

	2007	5344.303511	441834215.23	49464332.83	4822284.00	109367	300694
	2008	5575.539568	447715278.25	65263021.00	6395773.73	118349	305800
Kota Bandung	2004	8677.281110	1118862646.22	222910941.94	133554985.45	869022	2290464
	2005	9227.965862	1108116182.86	165596438.61	143107822.78	878590	2315895
	2006	9846.072595	1523026455.93	245367734.06	164781409.65	915020	2340324
	2007	10549.369119	1685638878.89	287249534.04	190496238.61	915147	2364312
	2008	11287.717771	2018841349.19	314627155.00	214397508.44	952752	2390120
Kota Cirebon	2004	16936.788583	251429907.00	37358716.00	9945851.00	105984	276912
	2005	17503.353031	254952065.06	28397531.08	11869338.91	106786	281089
	2006	18194.369978	418997809.47	56405520.07	13456234.15	108077	285363
	2007	18980.891720	504413293.67	57002328.37	15418405.60	113531	290450
	2008	19478.586598	555177377.78	67683578.00	17234097.16	127531	298995
Kota Bekasi	2004	5752.141849	624709428.06	96045083.00	43255832.24	656493	1931976
	2005	5885.154272	732368393.33	126067834.93	47368136.80	696384	1994850
	2006	6103.639834	893239243.31	145730557.61	65722882.68	722304	2040258
	2007	6357.829484	1109796738.02	171045088.71	52855531.15	768520	2084831
	2008	6597.493685	1264565324.84	189492859.00	78715152.99	901041	2128384
Kota Depok	2004	3281.731596	461858455.00	54067015.00	21541668.00	512775	1353249
	2005	3457.411963	502337703.96	62962583.59	29553373.00	517860	1373860
	2006	3635.272911	599179943.75	67218269.88	38385172.87	520608	1393568
	2007	3835.013718	767799925.00	86345667.00	42395759.00	570303	1412772
	2008	4033.326135	834728305.43	112763186.00	48456451.99	657050	1430829
Kota Cimahi	2004	10145.765106	268455688.04	39459318.31	14380453.51	162174	482763
	2005	10374.763519	275829041.74	47306445.15	13514946.97	170130	493698

	2006	10605.432099	390875549.61	50243232.26	13262016.90	179125	506250
	2007	10865.439271	445701887.34	55813859.45	14172997.80	207748	518985
	2008	11102.883968	501622532.48	64964961.00	15919330.57	219634	532114
Kota Tasikmalaya	2004	4891.837383	289220274.00	29937411.00	4049563.00	223872	579128
	2005	4959.960145	330293040.77	29671561.07	4653748.17	224034	594158
	2006	5074.894833	472095549.38	50829845.72	5173010.21	245346	610456
	2007	5257.190806	554973390.03	58604933.92	6135288.21	245757	624478
	2008	5446.700038	613808273.14	60822124.00	8572895.58	254054	637083
Kota Banjar	2004	3367.931539	90648773.24	4430267.56	685730.64	58718	166868
	2005	3387.565101	135940370.68	13273203.54	926504.02	59238	173576
	2006	3477.907384	266902611.31	18790119.21	1004892.26	61190	177118
	2007	3574.115877	373847445.45	22607582.63	979644.00	62886	180744
	2008	3667.845940	319487667.64	23636367.00	1657003.90	66417	184577

LAMPIRAN

B

DATA KONVERSI

Kabupaten/Kota	Tahun	PE	KW	DF	PD	TK	Ag
Kab. Bogor	2004	8.70	0.580590204	10.32	0.385738	1340253	0.101567127
	2005	8.72	0.603578541	10.06	0.426471	1399531	0.103138615
	2006	8.75	0.684014053	12.07	0.452126	1453567	0.103091484
	2007	8.78	0.652983975	11.48	0.501014	1455910	0.102673311
	2008	8.82	0.682051711	12.99	0.534415	1470487	0.102425765
Kab. Sukabumi	2004	8.04	0.186086000	5.04	0.122175	823478	0.029297467
	2005	8.07	0.159421000	5.97	0.123319	831625	0.029332925
	2006	8.10	0.116170000	5.98	0.132958	887261	0.028757343
	2007	8.14	0.134149000	6.11	0.145618	897200	0.028138418
	2008	8.17	0.123069000	7.15	0.174173	900258	0.027621632
Kab. Cianjur	2004	8.06	0.167581000	6.85	0.156977	805245	0.028190445
	2005	8.09	0.146958000	8.46	0.197680	821876	0.028077446
	2006	8.11	0.112908000	7.73	0.222530	855530	0.027370933
	2007	8.14	0.134050000	6.50	0.238882	860828	0.026781646
	2008	8.17	0.122867000	6.50	0.249881	876044	0.026329291
Kab. Bandung	2004	8.59	0.420159692	9.83	0.219946	1481516	0.092573645
	2005	8.58	0.401751559	9.02	0.201403	1463108	0.093741047
	2006	8.60	0.072502628	8.62	0.325027	1542607	0.068505002
	2007	8.72	0.558678899	8.71	0.335667	1544241	0.068144938
	2008	8.75	0.572953709	8.70	0.262094	1582854	0.067801370
Kab. Garut	2004	8.22	0.018922000	6.38	0.058642	816476	0.036119812

	2005	8.24	0.008545000	7.17	0.072474	849415	0.036091929
	2006	8.25	0.027764050	6.00	0.070901	862163	0.035452503
	2007	8.28	0.002261000	6.56	0.081778	884859	0.034878508
	2008	8.30	0.005071101	6.12	0.078519	886044	0.034500331
Kab. Tasikmalaya	2004	7.89	0.298610000	4.28	0.095718	736416	0.017926892
	2005	7.85	0.327843000	4.16	0.098440	715583	0.017852497
	2006	7.86	0.307912000	8.25	0.946748	720904	0.017518484
	2007	7.87	0.334322000	3.63	0.109936	808334	0.017167535
	2008	7.89	0.336979000	4.72	0.208148	863367	0.016872802
Kab. Ciamis	2004	8.22	0.025733000	5.88	0.088351	714612	0.024165690
	2005	8.25	0.002088481	3.44	0.086007	721554	0.024245149
	2006	8.27	0.045167607	3.52	0.082010	727902	0.023751507
	2007	8.31	0.026186523	5.20	0.085298	784173	0.023422543
	2008	8.34	0.045461203	4.03	0.102131	797136	0.023224226
Kab. Kuningan	2004	7.96	0.245623000	5.95	0.182205	434484	0.013185576
	2005	7.98	0.234768000	7.04	0.194395	435762	0.013164004
	2006	8.00	0.203900000	5.60	0.184832	513934	0.012932067
	2007	8.02	0.229081000	5.67	0.218918	524770	0.012655905
	2008	8.04	0.224864000	5.08	0.227991	525539	0.012471951
Kab Cirebon	2004	7.97	0.236918000	8.29	0.283271	804608	0.025907748
	2005	8.01	0.210103000	8.56	0.325100	826834	0.026113960
	2006	8.05	0.164273000	9.94	0.357136	828446	0.025902968
	2007	8.09	0.171224000	9.93	0.369724	843498	0.025793246
	2008	8.12	0.162324000	9.10	0.407775	844856	0.025405698

Kab. Majalengka	2004	7.96	0.246853000	5.84	0.085012	495728	0.014532882
	2005	8.00	0.220657000	6.81	0.103129	504676	0.014563554
	2006	8.03	0.177062000	7.14	0.109761	527927	0.014314594
	2007	8.07	0.186460000	5.02	0.105537	576147	0.014100210
	2008	8.11	0.168335000	5.22	0.119428	576818	0.013929711
Kab. Sumedang	2004	8.33	0.088546778	10.80	0.382574	414520	0.018497566
	2005	8.35	0.108003501	11.92	0.403534	419145	0.018548156
	2006	8.37	0.151932944	10.35	0.387665	468113	0.018229165
	2007	8.39	0.119186246	8.79	0.454767	507674	0.017915218
	2008	8.42	0.128274459	9.84	0.492761	514095	0.017703346
Kab. Indramayu	2004	8.94	1.013547294	7.00	0.070899	766150	0.057363479
	2005	8.85	0.837360980	6.50	0.083957	705442	0.050725461
	2006	8.87	0.898155016	6.03	0.097469	710300	0.049013698
	2007	8.88	0.828927503	4.93	0.098797	720973	0.047253576
	2008	8.90	0.832152109	5.48	0.137756	741242	0.045917732
Kab. Subang	2004	8.30	0.054933502	7.87	0.197558	568643	0.024174272
	2005	8.35	0.112241390	6.95	0.205890	571525	0.024804969
	2006	8.36	0.145806989	6.98	0.199546	588167	0.023976751
	2007	8.40	0.124365198	7.05	0.263068	647108	0.023608552
	2008	8.43	0.144060236	7.13	0.264603	649879	0.023365522
Kab. Purwakarta	2004	8.90	0.922267425	10.79	0.321766	281010	0.023800974
	2005	8.92	0.955517224	11.43	0.314336	284400	0.023635933
	2006	8.94	1.032575487	10.32	0.375405	287061	0.023161215
	2007	8.96	0.967481235	8.92	0.315994	320090	0.022601915

Kab. Karawang	2008	8.99	1.001142168	9.38	0.319189	321647	0.022421252
	2004	8.84	0.823258012	11.27	0.517552	624351	0.057599472
	2005	8.89	0.914008050	11.18	0.233273	650133	0.059604372
	2006	8.94	1.050038007	11.40	0.302431	714152	0.060458383
	2007	8.98	1.019982418	11.23	0.321290	732948	0.060270557
Kab. Bekasi	2008	9.03	1.070126754	11.74	0.333527	854404	0.060491890
	2004	9.92	4.355808587	12.76	0.159646	696764	0.167241853
	2005	9.96	4.551678920	17.43	0.166040	720896	0.170082393
	2006	10.09	5.419618924	19.17	0.168815	742586	0.185604283
	2007	10.04	4.797357050	17.43	0.197097	734633	0.169527127
Kota Bogor	2008	10.08	4.916095489	17.81	0.214014	741311	0.169906635
	2004	8.30	0.062296758	12.92	0.623713	264216	0.014421322
	2005	8.35	0.108209298	17.73	0.743904	272459	0.014682928
	2006	8.39	0.181931432	12.73	0.720187	289731	0.014687410
	2007	8.44	0.174395062	12.60	0.934587	308277	0.014636354
Kota Sukabumi	2008	8.49	0.209130238	13.62	1.081326	377388	0.014656868
	2004	8.48	0.268897086	13.96	0.245356	84378	0.005753940
	2005	8.50	0.296059467	11.79	0.266478	89816	0.005849296
	2006	8.54	0.369793412	12.69	0.289269	94518	0.005860207
	2007	8.58	0.354475374	11.20	0.300080	109367	0.005861107
Kota Bandung	2008	8.63	0.389042171	14.58	0.375119	118349	0.005875843
	2004	9.07	1.286012489	19.92	0.671975	869022	0.085279314
	2005	9.13	1.421961608	14.94	0.669636	878590	0.087969961
	2006	9.19	1.633476314	16.11	0.715104	915020	0.089487571

	2007	9.26	1.673661901	17.04	0.763757	915147	0.090969334
	2008	9.33	1.812125321	15.58	0.794683	952752	0.092976169
Kota Cirebon	2004	9.74	3.461963342	14.86	0.212065	105984	0.020123773
	2005	9.77	3.593910477	11.14	0.241247	106786	0.020252314
	2006	9.81	3.866350712	13.46	0.259172	108077	0.020163150
	2007	9.85	3.810570800	11.30	0.279674	113531	0.020107206
	2008	9.88	3.852728222	12.19	0.295915	127531	0.020070915
Kota Bekasi	2004	8.66	0.515390355	15.37	0.389236	656493	0.047683473
	2005	8.68	0.544611014	17.21	0.403476	696384	0.048325644
	2006	8.72	0.632507863	16.31	0.527767	722304	0.048361269
	2007	8.76	0.611346259	15.41	0.398759	768520	0.048344099
	2008	8.79	0.643643066	14.98	0.560569	901041	0.048392133
Kota Depok	2004	8.10	0.135434000	11.71	0.485063	512775	0.019055368
	2005	8.15	0.092572000	12.53	0.622176	517860	0.019552539
	2006	8.20	0.027693000	11.22	0.757702	520608	0.019673829
	2007	8.25	0.028043000	11.25	0.782498	570303	0.019760719
	2008	8.30	0.004828326	13.51	0.839654	657050	0.019888264
Kota Cimahi	2004	9.22	1.672881683	14.70	0.293598	162174	0.021016256
	2005	9.25	1.722948840	17.15	0.263861	170130	0.021083812
	2006	9.27	1.836578134	12.85	0.247011	179125	0.020850530
	2007	9.29	1.753767613	12.52	0.251339	207748	0.020566758
	2008	9.31	1.766077410	12.95	0.269454	219634	0.020360399
Kota Tasikmalaya	2004	8.50	0.288744851	10.35	0.142943	223872	0.012155789
	2005	8.51	0.301785597	8.98	0.157915	224034	0.012130807

	2006	8.53	0.357354946	10.77	0.166979	245346	0.012031094
	2007	8.57	0.332397284	10.56	0.186881	245757	0.011973872
	2008	8.60	0.356944194	9.91	0.247058	254054	0.011958461
Kota Banjar	2004	8.12	0.112725000	4.89	0.122016	58718	0.002411420
	2005	8.13	0.110903000	9.76	0.157569	59238	0.002420399
	2006	8.15	0.069783000	7.04	0.163132	61190	0.002392238
	2007	8.18	0.094166000	6.05	0.151648	62886	0.002356114
	2008	8.21	0.086224000	7.40	0.244757	66417	0.002333106

LAMPIRAN

C

HASIL ANALISIS REGRESI PERTUMBUHAN EKONOMI

Dependent Variable: PE

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 10/07/10 Time: 15:25

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.172272	0.044870	182.1305	0.0000
DF	0.039575	0.006078	6.511421	0.0000
PD	-0.193616	0.082789	-2.338653	0.0210
TK	-6.24E-07	3.70E-08	-16.86054	0.0000
AG	10.21682	0.646095	15.81320	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.875719	Mean dependent var	15.01750
Adjusted R-squared	0.871576	S.D. dependent var	12.20044
S.E. of regression	0.278884	Sum squared resid	9.333169
F-statistic	211.3880	Durbin-Watson stat	0.328536
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.666244	Mean dependent var	8.578570
Sum squared resid	12.36898	Durbin-Watson stat	0.202069

**HASIL ANALISIS REGRESI
KETIMPANGAN WILAYAH**

Dependent Variable: KW

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 10/07/10 Time: 16:11

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.78774	0.354511	-30.42991	0.0000
PE	1.371285	0.041878	32.74497	0.0000
DF	-0.015428	0.004965	-3.107000	0.0024
PD	-0.349071	0.054634	-6.389283	0.0000
TK	-6.78E-07	5.56E-08	-12.18981	0.0000
AG	9.063410	0.631098	14.36133	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.923644	Mean dependent var	0.942734
Adjusted R-squared	0.920436	S.D. dependent var	1.414250
S.E. of regression	0.379318	Sum squared resid	17.12197
F-statistic	287.8996	Durbin-Watson stat	0.198219
Prob(F-statistic)	0.000000		

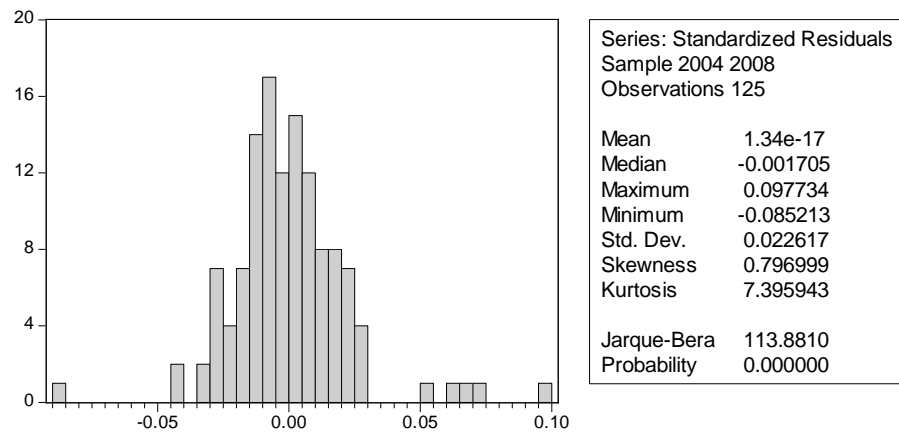
Unweighted Statistics

R-squared	0.848902	Mean dependent var	0.751304
Sum squared resid	24.76406	Durbin-Watson stat	0.092925

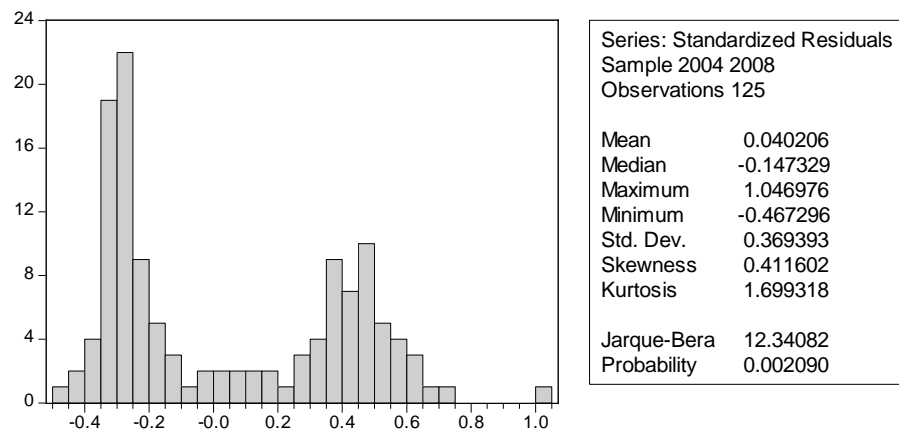
LAMPIRAN

D

UJI NORMALITAS DATA
PERTUMBUHAN EKONOMI (NORMALITAS DATA)



KETIMPANGAN WILAYAH (NORMALITAS DATA)



UJI AUTOKORELASI 1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Dependent Variable: PE
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 10/07/10 Time: 15:25
 Sample: 2004 2008
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 25
 Total panel (balanced) observations: 125
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.172272	0.044870	182.1305	0.0000
DF	0.039575	0.006078	6.511421	0.0000
PD	-0.193616	0.082789	-2.338653	0.0210
TK	-6.24E-07	3.70E-08	-16.86054	0.0000
AG	10.21682	0.646095	15.81320	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.875719	Mean dependent var	15.01750
Adjusted R-squared	0.871576	S.D. dependent var	12.20044
S.E. of regression	0.278884	Sum squared resid	9.333169
F-statistic	211.3880	Durbin-Watson stat	0.328536
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.666244	Mean dependent var	8.578570
Sum squared resid	12.36898	Durbin-Watson stat	0.202069

2 KETIMPANGAN WILAYAH

Dependent Variable: KW
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 10/07/10 Time: 16:11
 Sample: 2004 2008
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 25
 Total panel (balanced) observations: 125
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.78774	0.354511	-30.42991	0.0000
PE	1.371285	0.041878	32.74497	0.0000
DF	-0.015428	0.004965	-3.107000	0.0024
PD	-0.349071	0.054634	-6.389283	0.0000
TK	-6.78E-07	5.56E-08	-12.18981	0.0000
AG	9.063410	0.631098	14.36133	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.923644	Mean dependent var	0.942734
Adjusted R-squared	0.920436	S.D. dependent var	1.414250
S.E. of regression	0.379318	Sum squared resid	17.12197
F-statistic	287.8996	Durbin-Watson stat	0.198219
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.848902	Mean dependent var	0.751304
Sum squared resid	24.76406	Durbin-Watson stat	0.092925

TSEG (TWO STAGE ENGLE-GRANGER) 1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Dependent Variable: D(PE)

Method: Panel Least Squares

Date: 09/01/10 Time: 00:28

Sample (adjusted): 2005 2008

Periods included: 4

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 100

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	167.1225	45.58544	3.666138	0.0004
D(DF)	28.82763	21.45225	1.343805	0.1822
D(PD)	-80.70798	294.5872	-0.273970	0.7847
D(TK)	0.002000	0.001291	1.548780	0.1248
D(AG)	4758.505	3311.215	1.437087	0.1540
RESID01(-1)	0.031212	0.014901	2.094648	0.0389
R-squared	0.108381	Mean dependent var		208.4629
Adjusted R-squared	0.060955	S.D. dependent var		364.3039
S.E. of regression	353.0263	Akaike info criterion		14.62909
Sum squared resid	11714994	Schwarz criterion		14.78540
Log likelihood	-725.4544	Hannan-Quinn criter.		14.69235
F-statistic	2.285242	Durbin-Watson stat		2.783912
Prob(F-statistic)	0.052325			

2 KETIMPANGAN WILAYAH

Dependent Variable: D(KW)

Method: Panel Least Squares

Date: 09/01/10 Time: 00:33

Sample (adjusted): 2005 2008

Periods included: 4

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 100

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.033435	0.008255	-4.050061	0.0001
D(PE)	0.000294	1.67E-05	17.61069	0.0000
D(DF)	0.003564	0.003577	0.996374	0.3217
D(PD)	-0.054759	0.048762	-1.122992	0.2643
D(TK)	-8.45E-08	2.15E-07	-0.392770	0.6954
D(AG)	3.643852	0.543370	6.706028	0.0000
RESID01(-1)	-0.068515	0.034446	-1.989078	0.0496
R-squared	0.827207	Mean dependent var		0.021630
Adjusted R-squared	0.816059	S.D. dependent var		0.136256
S.E. of regression	0.058438	Akaike info criterion		-2.774269
Sum squared resid	0.317596	Schwarz criterion		-2.591907
Log likelihood	145.7134	Hannan-Quinn criter.		-2.700464
F-statistic	74.20271	Durbin-Watson stat		2.281286
Prob(F-statistic)	0.000000			

UJI HETEROSKEDASTISITAS 1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Dependent Variable: LOG(RES2)

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/10 Time: 15:27

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DF	-0.239424	0.058747	-4.075532	0.0001
PD	1.031206	1.378049	0.748308	0.4557
TK	-4.67E-06	5.99E-07	-7.800283	0.0000
AG	23.27262	7.958197	2.924359	0.0041
R-squared	0.009727	Mean dependent var		-4.239135
Adjusted R-squared	-0.014825	S.D. dependent var		2.495556
S.E. of regression	2.513987	Akaike info criterion		4.713094
Sum squared resid	764.7357	Schwarz criterion		4.803600
Log likelihood	-290.5684	Hannan-Quinn criter.		4.749861
Durbin-Watson stat	0.794108			

2.KETIMPANGAN WILAYAH

Dependent Variable: LOG(RES2)

Method: Panel Least Squares

Date: 10/26/10 Time: 13:02

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.111875	3.502024	-1.459692	0.1470
PE	0.558023	0.427357	1.305754	0.1942
DF	-0.170324	0.066568	-2.558631	0.0118
PD	-1.083670	0.876669	-1.236122	0.2188
TK	-1.02E-06	5.85E-07	-1.738254	0.0848
AG	10.23700	6.774966	1.511004	0.1334
R-squared	0.191194	Mean dependent var		-2.574960
Adjusted R-squared	0.157211	S.D. dependent var		1.574804
S.E. of regression	1.445726	Akaike info criterion		3.621911
Sum squared resid	248.7248	Schwarz criterion		3.757670
Log likelihood	-220.3694	Hannan-Quinn criter.		3.677062
F-statistic	5.626090	Durbin-Watson stat		0.701950
Prob(F-statistic)	0.000108			

**UJI MULTIKOLINEARITAS
1 PERTUMBUHAN EKONOMI**

Dependent Variable: DF

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/10 Time: 15:39

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.669129	0.470755	16.29111	0.0000
PD	9.740295	0.914655	10.64915	0.0000
TK	-5.56E-06	6.37E-07	-8.715641	0.0000
AG	69.08012	5.939913	11.62982	0.0000
R-squared	0.693724	Mean dependent var		9.906330
Adjusted R-squared	0.686131	S.D. dependent var		3.885849
S.E. of regression	2.177010	Akaike info criterion		4.425259
Sum squared resid	573.4640	Schwarz criterion		4.515765
Log likelihood	-272.5787	Hannan-Quinn criter.		4.462026
F-statistic	91.35627	Durbin-Watson stat		0.780616
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: PD

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/10 Time: 15:40

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.230167	0.056311	-4.087403	0.0001
DF	0.049670	0.004664	10.64915	0.0000
TK	2.72E-07	5.25E-08	5.181234	0.0000
AG	-3.188470	0.544990	-5.850509	0.0000
R-squared	0.487117	Mean dependent var		0.306119
Adjusted R-squared	0.474401	S.D. dependent var		0.214434
S.E. of regression	0.155461	Akaike info criterion		-0.853372
Sum squared resid	2.924329	Schwarz criterion		-0.762866
Log likelihood	57.33573	Hannan-Quinn criter.		-0.816604
F-statistic	38.30711	Durbin-Watson stat		0.741587
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/10 Time: 15:41

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	796746.8	59987.41	13.28190	0.0000
DF	-69427.36	7965.835	-8.715641	0.0000
PD	667102.6	128753.6	5.181234	0.0000
AG	7903937.	646201.8	12.23138	0.0000
R-squared	0.567212	Mean dependent var		625682.8
Adjusted R-squared	0.556481	S.D. dependent var		365449.6
S.E. of regression	243379.2	Akaike info criterion		27.67411
Sum squared resid	7.17E+12	Schwarz criterion		27.76461
Log likelihood	-1725.632	Hannan-Quinn criter.		27.71087
F-statistic	52.86081	Durbin-Watson stat		0.402522
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: AG

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/10 Time: 15:42

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.058748	0.007053	-8.329022	0.0000
DF	0.007641	0.000657	11.62982	0.0000
PD	-0.069157	0.011821	-5.850509	0.0000
TK	6.99E-08	5.72E-09	12.23138	0.0000
R-squared	0.669056	Mean dependent var		0.039536
Adjusted R-squared	0.660851	S.D. dependent var		0.039314
S.E. of regression	0.022895	Akaike info criterion		-4.684295
Sum squared resid	0.063427	Schwarz criterion		-4.593789
Log likelihood	296.7684	Hannan-Quinn criter.		-4.647527
F-statistic	81.54032	Durbin-Watson stat		0.575428
Prob(F-statistic)	0.000000			

2 KETIMPANGAN WILAYAH

Dependent Variable: PE

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/10 Time: 16:12

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.089666	0.119334	67.78992	0.0000
DF	0.065628	0.012896	5.089071	0.0000
PD	-0.542812	0.180589	-3.005788	0.0032
TK	-5.24E-07	1.15E-07	-4.543838	0.0000
AG	8.419700	1.226212	6.866429	0.0000
R-squared	0.691194	Mean dependent var	8.578570	
Adjusted R-squared	0.680901	S.D. dependent var	0.546690	
S.E. of regression	0.308819	Akaike info criterion	0.527057	
Sum squared resid	11.44433	Schwarz criterion	0.640190	
Log likelihood	-27.94109	Hannan-Quinn criter.	0.573017	
F-statistic	67.14842	Durbin-Watson stat	0.273141	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: DF

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/10 Time: 16:12

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15.57319	4.587182	-3.394936	0.0009
PE	2.704804	0.531493	5.089071	0.0000
PD	9.479485	0.834535	11.35900	0.0000
TK	-3.15E-06	7.48E-07	-4.210959	0.0000
AG	34.04398	8.755504	3.888295	0.0002
R-squared	0.748092	Mean dependent var	9.906330	
Adjusted R-squared	0.739695	S.D. dependent var	3.885849	
S.E. of regression	1.982565	Akaike info criterion	4.245838	
Sum squared resid	471.6678	Schwarz criterion	4.358971	
Log likelihood	-260.3649	Hannan-Quinn criter.	4.291798	
F-statistic	89.09091	Durbin-Watson stat	0.843436	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: PD

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/10 Time: 16:13

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.829445	0.356716	2.325222	0.0217
PE	-0.128991	0.042914	-3.005788	0.0032
DF	0.054657	0.004812	11.35900	0.0000
TK	1.86E-07	5.85E-08	3.172637	0.0019
AG	-1.879152	0.684300	-2.746095	0.0070
R-squared	0.523028	Mean dependent var		0.306119
Adjusted R-squared	0.507129	S.D. dependent var		0.214434
S.E. of regression	0.150543	Akaike info criterion		-0.909962
Sum squared resid	2.719573	Schwarz criterion		-0.796829
Log likelihood	61.87262	Hannan-Quinn criter.		-0.864002
F-statistic	32.89680	Durbin-Watson stat		0.813311
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/10 Time: 16:13

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2945455.	476145.9	6.186033	0.0000
PE	-280069.4	61637.18	-4.543838	0.0000
DF	-40855.22	9702.117	-4.210959	0.0000
PD	417148.9	131483.3	3.172637	0.0019
AG	9101764.	654782.4	13.90044	0.0000
R-squared	0.630744	Mean dependent var		625682.8
Adjusted R-squared	0.618435	S.D. dependent var		365449.6
S.E. of regression	225741.6	Akaike info criterion		27.53135
Sum squared resid	6.12E+12	Schwarz criterion		27.64448
Log likelihood	-1715.709	Hannan-Quinn criter.		27.57731
F-statistic	51.24439	Durbin-Watson stat		0.340453
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: AG

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/10 Time: 16:14

Sample: 2004 2008

Periods included: 5

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 125

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.313193	0.037539	-8.343091	0.0000
PE	0.033502	0.004879	6.866429	0.0000
DF	0.003287	0.000845	3.888295	0.0002
PD	-0.031464	0.011458	-2.746095	0.0070
TK	6.78E-08	4.88E-09	13.90044	0.0000
R-squared	0.762406	Mean dependent var		0.039536
Adjusted R-squared	0.754487	S.D. dependent var		0.039314
S.E. of regression	0.019480	Akaike info criterion		-4.999682
Sum squared resid	0.045536	Schwarz criterion		-4.886549
Log likelihood	317.4801	Hannan-Quinn criter.		-4.953722
F-statistic	96.26602	Durbin-Watson stat		0.436895
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN

E

**UJI STATISTIK
KOEFSIEN DETERMINASI (R²), UJI SIGNIFIKANSI SIMULTAN (UJI-f), UJI
SIGNIFIKANSI PARSIAL(UJI-t)**

Dependent Variable: PE
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 10/07/10 Time: 15:25
Sample: 2004 2008
Periods included: 5
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 125
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.172272	0.044870	182.1305	0.0000
DF	0.039575	0.006078	6.511421	0.0000
PD	-0.193616	0.082789	-2.338653	0.0210
TK	-6.24E-07	3.70E-08	-16.86054	0.0000
AG	10.21682	0.646095	15.81320	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.875719	Mean dependent var	15.01750
Adjusted R-squared	0.871576	S.D. dependent var	12.20044
S.E. of regression	0.278884	Sum squared resid	9.333169
F-statistic	211.3880	Durbin-Watson stat	0.328536
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.666244	Mean dependent var	8.578570
Sum squared resid	12.36898	Durbin-Watson stat	0.202069

Dependent Variable: KW
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 10/07/10 Time: 16:11
Sample: 2004 2008
Periods included: 5
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 125
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.78774	0.354511	-30.42991	0.0000
PE	1.371285	0.041878	32.74497	0.0000
DF	-0.015428	0.004965	-3.107000	0.0024
PD	-0.349071	0.054634	-6.389283	0.0000
TK	-6.78E-07	5.56E-08	-12.18981	0.0000
AG	9.063410	0.631098	14.36133	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.923644	Mean dependent var	0.942734
Adjusted R-squared	0.920436	S.D. dependent var	1.414250
S.E. of regression	0.379318	Sum squared resid	17.12197
F-statistic	287.8996	Durbin-Watson stat	0.198219
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.848902	Mean dependent var	0.751304
Sum squared resid	24.76406	Durbin-Watson stat	0.092925